

**LAPORAN KEUANGAN  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA  
ANGGARAN ESELON I BA. 018.11  
TAHUN ANGGARAN 2020 (AUDITED)**

Untuk Periode yang Berakhir  
Tanggal 31 Desember 2020



**BADAN KETAHANAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Gedung E, Lantai 2  
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan Pasar-Minggu  
Jakarta Selatan – 12550

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Ketahanan Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Ketahanan Pangan. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 30 April 2021  
Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng  
NIP 196108021989031011



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
Pernyataan TanggungJawab	xii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	57
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	83
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	100
F. Pengungkapan Penting Lainnya	106
VI. Lampiran	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1	Rekapitulasi Pedoman/Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
Lampiran B.1	Realisasi per jenis Belanja berdasarkan Kegiatan
Lampiran B.3	Jumlah dan Komposisi Pegawai per Eselon 1 berdasarkan Jabatan Pegawai
Lampiran B.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Lampiran B.4.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Lampiran B.4.2	Rekap Komoditas Kegiatan Pertanian Keluarga
Lampiran B.4.3	Alokasi dan Realisasi Fisik dan Pagu dan Realisasi Rupiah per tahap penumbuhan dan pengembangan kegiatan P2I/KRPL
Lampiran B.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Lampiran C.1.1	Monitoring Penyelesaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
Lampiran C.1.2	Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran
Lampiran C.3.1	Monitoring daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
Lampiran C.4	Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Bukan Pajak
Lampiran F.2.1	Monitoring Daftar Temuan dan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Tindak Lanjut atas Temuan BPK
Lampiran F.2.2	Hibah
Lampiran F.2.4	Monitoring DPM-LUEP hasil rekon KPKNL
Lampiran F.2.5	Monitoring Tindak Lanjut Kerugian Negara Temuan Hasil Audit Itjen, BPKP, BPK
Lampiran F.2.6	Analisa Pendapatan
Lampiran F.2.7	BAR PNBPN
Lampiran F.2.8	BAR SAK – SIMAK
Lampiran F.2.9	Rekap Bantuan 526 dalam Bentuk Barang

## DAFTAR TABEL

Tabel A.2.1	Rincian Perbandingan Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi Laporan Keuangan (SAIBA)
Tabel A.2.2	Satker Lingkup Badan Ketahanan Pangan
Tabel A.5.1	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Badan Ketahanan Pangan
Tabel A.5.2	Masa Manfaat Aset Tetap
Tabel A.5.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Tabel B.1.1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Tabel B.1.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tabel B.1.5	Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tabel B.2.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi berdasarkan Kegiatan
Tabel B.3.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tabel B.4.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tabel B.4.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang akun Detail
Tabel B.4.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19
Tabel B.4.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Mak 526
Tabel B.5.1	Perbandingan Belanja Modal
Tabel B.5.2	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tabel B.5.3	Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tabel B.5.4	Perbandingan Belanja Modal Lainnya
Tabel C.1	Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran
Tabel C.2.1	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Tabel C.2.2	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker
Tabel C.3	Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka per Satker
Tabel C.4	Perbandingan Piutang PNPB
Tabel C.5	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Satker
Tabel C.6	Rincian Penyisihan Piutang Lancar
Tabel C.7	Rincian Jenis Persediaan
Tabel C.8	Rincian Aset Tetap
Tabel C.9.1	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Tabel C.9.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020
Tabel C.9.3	Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 Setelah Akumulasi Penyusutan
Tabel C.9.4	Rincian Pencatatan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020
Tabel C.10.1	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020
Tabel C.10.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020
Tabel C.10.3	Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 Setelah Akumulasi Penyusutan
Tabel C.10.4	Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020
Tabel C.12.1	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020
Tabel C.12.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember

	2020
Tabel C.12.3	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 Setelah Akumulasi Penyusutan
Tabel C.12.4	Rincian Pencatatan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020
Tabel C.13.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tabel C.14.1	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud Per Jenis Aset
Tabel C.14.2	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020
Tabel C.14.3	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020
Tabel C.14.4	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal Lainnya
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020
Tabel C.15.2	Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain – Lain per 31 Desember 2020
Tabel C.15.3	Rincian Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 Setelah Akumulasi Penyusutan
Tabel C.16	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020
Tabel C.17	Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Tabel C.17.1	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel C.17.2	Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel D.	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)
Tabel D.1	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)
Tabel D.2.1	Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel D.3.1	Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel D.4	Perbandingan Beban Barang Dan Jasa Persediaan untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel D.5	Perbandingan Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel D.6	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel D.7	Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan Periode 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi Periode 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel E.3.3	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Periode 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel E.3.4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2020 dan 2019
Tabel E.4	Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam Rupiah)

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.956.864.475 atau mencapai 19.827,46% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp25.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp466.931.810.211 atau mencapai 98,11% dari alokasi anggaran sebesar Rp475.903.216.000.

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.739.487,063 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.574.196.146; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0; Aset Tetap (netto) sebesar Rp21.761.332.917; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp403.958.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp367.525.222 dan Rp23.371.961.841.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.804.969, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp481.314.748.889 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp(481.297.943.920). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp4.420.226.241 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(476.877.717.679).



#### **IV. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp36.557.010.877 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(476.877.717.679) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp(396.600.234) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp464.089.268.877 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.371.961.841

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk sampai dengan 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BADAN KETAHANAN PANGAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**  
**(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020		% THD ANGGARAN	31 DESEMBER 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	25.000.000	4.956.864.475	19827,46	2.998.777.179
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>25.000.000</b>	<b>4.956.864.475</b>	<b>19.827,46</b>	<b>2.998.777.179</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	20.288.729.000	19.889.420.216	98,03	20.027.724.209
Belanja Barang	B.4	450.327.655.000	441.788.078.525	98,10	621.340.775.249
Belanja Modal	B.5	5.286.832.000	5.254.311.470	99,38	18.293.918.156
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>475.903.216.000</b>	<b>466.931.810.211</b>	<b>98,11</b>	<b>659.662.417.614</b>

**BADAN KETAHANAN PANGAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	334.300.000	30.373.682
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	981.696.022	291.598.872
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	70.416.000	6.695.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	187.672.486	19.025.000
Penyisihan Piutang Bukan Pajak - Piutang Bukan Pajak	C.5	(938.362)	(1.902.500)
Piutang Bukan Pajak Netto		186.734.124	17.122.500
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.6	-	92.444.035
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	-	(9.244.403)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	83.199.632
Persediaan	C.8	1.050.000	6.443.685.400
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>1.574.196.146</b>	<b>13.560.980.086</b>

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.9	-	-
Peralatan dan Mesin	C.10	53.031.386.144	52.253.829.266
Gedung dan Bangunan	C.11	430.324.000	864.181.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.12	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.13	4.329.476.128	2.903.442.158
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.15	(36.029.853.355)	(33.254.281.898)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>21.761.332.917</b>	<b>22.767.170.526</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.16	627.359.000	285.205.000
Aset Lain-lain	C.17	2.244.188.567	1.132.290.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.18	(2.467.589.567)	(1.128.834.000)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>403.958.000</b>	<b>288.661.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>23.739.487.063</b>	<b>23.055.831.526</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	33.225.222	29.427.053
Pendapatan Diterima Dimuka	C.20	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.21	334.300.000	30.373.682
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>367.525.222</b>	<b>59.800.735</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>367.525.222</b>	<b>59.800.735</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.22	23.371.961.841	36.557.010.877
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>23.371.961.841</b>	<b>36.557.010.877</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>23.739.487.063</b>	<b>36.616.811.612</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL****BADAN KETAHANAN PANGAN  
LAPORAN OPERASIONAL****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019****(AUDITED)****(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	16.804.969	55.038.561
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>16.804.969</b>	<b>55.038.561</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	19.849.990.366	20.022.804.490
Beban Persediaan	D.3	7.645.205.014	12.657.868.645
Beban Barang dan Jasa	D.4	124.108.544.020	133.084.755.948
Beban Pemeliharaan	D.5	4.405.651.669	4.701.246.850
Beban Perjalanan Dinas	D.6	74.034.547.053	129.917.244.271
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	245.676.825.837	328.521.027.919
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	5.604.193.471	4.852.396.421
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(10.208.541)	10.579.190
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>481.314.748.889</b>	<b>633.767.923.734</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(481.297.943.920)</b>	<b>(633.712.885.173)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.10		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	88.256.552	(2.252.348.373)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	232.987.231	7.934.489
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	144.730.679	2.260.282.862
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	4.331.969.689	3.054.335.848
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	4.425.879.065	3.635.480.038
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	93.909.376	581.144.190
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>4.420.226.241</b>	<b>801.987.475</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) - LO</b>		<b>(476.877.717.679)</b>	<b>(632.910.897.698)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****BADAN KETAHANAN PANGAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019****(AUDITED)****(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
EKUITAS AWAL	E.1	36.557.010.877	12.102.110.040
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(476.877.717.679)	(632.910.897.698)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(396.600.234)	
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	(66.561.250)	0
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3	(251.518.707)	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	(78.520.277)	(600.000)
Lain-lain	E.3.5	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>(396.600.234)</b>	<b>(600.000)</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	464.089.268.877	657.366.398.535
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS		(13.185.049.036)	
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>23.371.961.841</b>	<b>36.557.010.877</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas,Badan Ketahanan Pangan berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.”*** Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi sebagai berikut :

- Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
- Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
- Memperkuat sistem distribusi pangan;
- Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
- Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Badan Katakahan Pangan dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Bantuan Pemerintah tersebut dapat dijelaskan pada **Lampiran A.1.**

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Ketahanan Pangan.

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Badan Ketahanan Pangan termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Badan Ketahanan Pangan seperti Eselon I, Sekretariat Wilayah, serta Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan melalui aplikasi e-Rekon LK per tanggal 30 April 2021.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara:

1. Proses kapitalisasi aset tetap dilakukan melalui pengiriman secara elektronik dari aplikasi SIMAK-BMN secara berjenjang.
2. Satker melakukan unggah (*upload*) data berupa Arsip Data Komputer (ADK) SAIBA berbentuk file kirim ke KPPN yang sudah melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikator dan reuiu oleh Tim Inspektorat Jenderal Badan Ketahanan Pangan.
3. Pengumpulan data melalui pengunduhan dari Aplikasi e-Rekon-LK keluaran Kementerian Keuangan, dimana Satker melakukan upload data berupa Arsip Data Komputer (ADK) ke Aplikasi e-Rekon-LK untuk kemudian diunduh secara berjenjang melalui Aplikasi e-Rekon-LK tingkat konsolidasi. Pada penyusunan LK Tahun 2020 ini diunduh berdasarkan Aplikasi e-Rekon-LK tanggal 30 April 2021.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada tahun 2020 Badan Ketahanan Pangan menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN senilai Rp663.563.546.000. Selama periode berjalan dan sesuai dengan Surat No. B-1305/RC.110/A/04/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penyampaian Penyesuain Belanja Lingkup Kementerian Pertanian TA. 2020 dan Surat dari Direktorat Jenderal Anggaran No. S-585/AG/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Revisi Anggaran Satker Lingkup Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian TA.



2020, maka Badan Ketahanan Pangan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan di kementerian, penghematan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan khususnya untuk penanggulangan dan antisipasi dampak bencana wabah penyakit virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 jumlah pagu anggaran yang tercatat senilai Rp475.903.216.000. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi yang tercatat Laporan Keuangan (SAIBA) pada Tahun 2020 pada Tabel A.2.1.

**Tabel A.2.1 Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi Laporan Keuangan (SAIBA) Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Eselon I	Nilai Pagu Awal	Revisi Pagu	Selisih
Belanja Pegawai	21.475.203.000	20.288.729.000	1.186.474.000
Belanja Barang	638.177.718.000	450.327.655.000	184.151.458.000
Belanja Modal	3.910.625.000	5.286.832.000	(1.376.207.000)
<b>JUMLAH</b>	<b>663.563.546.000</b>	<b>475.903.216.000</b>	<b>183.961.725.000</b>

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 sebanyak 35 satker (DIPA), Rincian satker tersebut tersaji pada Tabel A.2.2.

**Tabel A.2.2 Satker Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020**

No	NAMA SATKER	JENIS		JUMLAH SATKER
		KP	DK	
1	452332   BADAN KETAHANAN PANGAN	√		1
2	019032   DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA		√	1
3	029346   DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT		√	1
4	039427   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH		√	1
5	049037   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY		√	1
6	059444   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR		√	1
7	069027   DINAS PANGAN ACEH		√	1
8	079318   DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA		√	1

9	089266   DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT		√	1
10	099426   DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU		√	1
11	109019   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI		√	1
12	119225   DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN		√	1
13	129224   DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		√	1
14	139021   DINAS PANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT		√	1
15	149214   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		√	1
16	159192   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		√	1
17	169000   DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		√	1
18	179212   DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA		√	1
19	189206   DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	1
20	199374   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN		√	1
21	209186   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA		√	1
22	219169   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU		√	1
23	229164   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI		√	1
24	239220   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		√	1
25	249020   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		√	1
26	259022   DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA		√	1
27	269189   DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU		√	1
28	289039   DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA		√	1
29	299444   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI		√	1

	BANTEN			
30	309208   DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		√	1
31	319005   DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO		√	1
32	320097   DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU		√	1
33	339029   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT		√	1
34	340161   DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT		√	1
35	417679   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA		√	1
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>35</b>

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, Satker melakukan unggah (*upload*) data berupa Arsip Data Komputer (ADK) SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK, kemudian entitas pelaporan konsolidasi termasuk Kementerian mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) melalui pengunduhan dari Aplikasi e-Rekon-LK tingkat konsolidasi. Aplikasi e-Rekon-LK belum bisa menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK antara lain: analisa belanja/pendapatan LRA dengan LO maupun rincian aset per NUP seperti yang bisa disajikan oleh aplikasi SIMAK-BMN.

### A.3. Basis Akuntansi

Badan Ketahanan Pangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Ketahanan Pangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **2. Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **3. Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **4. Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

## **5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

**Tabel A.5.1 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Badan Ketahanan Pangan**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 4) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b) Harga standar (kapitalisasi) apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### **Penatausahaan Persediaan**

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP Sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada peraturan tersebut pada Pasal 12 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

1. Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526111);
2. Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112);
3. Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526113);
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526114);
5. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115);
6. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526211);
7. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526212); dan
8. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Sedangkan pada Pasal 36 bahwa persediaan yang langsung diserahkan kepada pihak penerima, transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda dibuktikan dengan dokumen sumber pengeluaran persediaan untuk:

- a) Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dapat berupa:
  - a. BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja;
  - b. BAST Persediaan antara kepala satuan kerja atau PPK dengan penerima;

- c. BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD; atau
  - d. Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Kantor Pusat dan Kantor Daerah dapat berupa:
- (1) Surat Keputusan Hibah;
  - (2) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD;
  - (3) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja/PPK dengan penerima;
  - (4) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja; atau
  - (5) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

Disamping itu, Pasal 43 menjelaskan bahwa seluruh pelaporan persediaan pada tanggal pelaporan dicatat berdasarkan *opname* fisik. Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah Persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Persediaan yang belum dipakai. *Opname* fisik Persediaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara sensus per semester atau periode laporan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No : S-1984/PB/2017 Tanggal 21 Februari 2017 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) berupa uang yang meliputi:

Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526121)

Belanja Aisin Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526122)

Belanja Gedung & Bangunan Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526123)

Belanja Jalan, Irigasi dan Jringan Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526124)

Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam bentuk uang (526312)

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:



- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
  - 5) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
  - 6) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
  - 7) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.
- c. Penyusutan Aset Tetap
- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
  - 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a) Tanah;
  - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

**Tabel A.5.2. Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Badan Ketahanan Pangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian. Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan BMN) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 788/Kpts/PL.310/11/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai berikut :

Kegiatan		Pengelola Barang		
		KPKNL	Kanwil DJKN	PKNSI
Jenis dan Nilai BMN		Tanah dan Bangunan		
		sd 5 M	>5 sd 10 M	>10 sd 25 M
		Selain Tanah dan Bangunan		
		sd 2,5	>2,5 sd 5 M	>5 sd 10M
a.	Mendandatangani surat pernyataan, surat keterangan, dan naskah dinas lain terkait PSP BMN	Satker	Satker	Satker
b.	Mengusulkan sewa	Satker	Eselon I	Sekjen
c.	Penetapan pelaksana sewa dan penandatanganan perjanjian sewa	Satker	Satker	Satker
d.	Mengusulkan pinjam pakai	Satker	Eselon I	Sekjen
e.	Penandatanganan pinjam pakai	Eselon I	Eselon I	Eselon I
f.	Mengusulkan KSP	Satker	Eselon I	Sekjen
g.	Pemilihan Mitra KSP dan penandatanganan perjanjian Kerjasama	Satker	Satker	Satker

e. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan.

f. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan senilai nilai tercatat neto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

**Tabel A.5.3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Tanaman Semusim	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan senilai nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## 6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN****B.1. PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.956.864.475 atau mencapai 19.827,46% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut.

**Tabel B.1.1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**

Uraian	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
PNBP	25.000.000	4.956.864.475	19.827
Pendapatan Lain-lain	0		0
<b>Jumlah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>4.956.864.475</b>	<b>19.827</b>

Berdasarkan Tabel B.1.1 terdapat pendapatan yang realisasinya melebihi estimasi pendapatan. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan pendapatan seperti tertera pada tabel B.1.2.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi pendapatan TA 2020 dan TA 2019.

**Tabel B.1.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	232.507.231	4.300.000	5.307,14
425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	480.000	3.634.489	(86,79)
425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	708.305	25.610.722	(97,23)
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.121.664	49.427.839	(28,94)
425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	92.444.035	8.252.500	1.020,19
425792 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi bendahara		21.724.814	(100,00)
425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	47.304.010	50.489.616	(6,31)
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	77.615.005	51.975.190	49,33
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.470.684.225	2.783.362.009	60,62
<b>Total</b>	<b>4.956.864.475</b>	<b>2.998.777.179</b>	<b>65,30</b>

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.958.087.296 atau 65,30% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain karena Meningkatnya Pendapatan

dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu antara lain terdiri atas : Pengembalian perjalanan dinas sebesar Rp1.832.689.489, pengembalian belanja banper sebesar Rp600.693.872, pengembalian DPM-LUEP sebesar Rp434.370.730, pengembalian Kegiatan PMS Rp226.585.530, Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur BKP Bagian Umum TAYL Rp579.590. 000, pengembalian atas kegiatan PIDRA Rp6.000.000, pengembalian atas honor dan pengembalian atas kegiatan lainnya sebesar Rp790.754.604.

Tidak terdapat selisih antara Realisasi pendapatan menurut data saiba dan data di bendahara penerimaan sebesar Rp4.956.864.475.

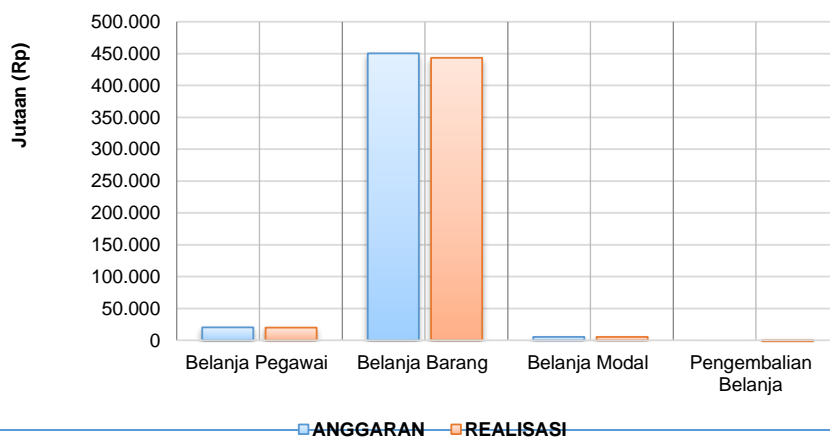
## B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp466.931.810.211 atau 98,11% dari anggaran belanja sebesar Rp475.903.216.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel B.2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020**

Uraian	Periode yang berakhir 31 Desember 2020				% Real Anggaran
	Anggaran	Realisasi bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Pegawai	20.288.729.000	19.900.793.758	11.373.542	19.889.420.216	98,03
Belanja Barang	450.327.655.000	443.389.597.648	1.601.519.123	441.788.078.525	98,10
Belanja Modal	5.286.832.000	5.259.561.470	5.250.000	5.254.311.470	99,38
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>475.903.216.000</b>	<b>468.549.952.876</b>	<b>1.618.142.665</b>	<b>466.931.810.211</b>	<b>98,11</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Gambar B.2



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020 ditunjukkan pada Tabel B.2.2.

**Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Kegiatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020**

Uraian	Periode yang berakhir 31 Desember 2020				% Real Anggaran
	Anggaran	Realisasi bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	134.130.438.000	131.796.124.307	1.249.589.709	130.546.534.598	97,33
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	42.879.809.000	41.990.490.501	305.462.498	41.685.028.003	97,21
1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	206.870.670.000	204.325.668.385	37.183.844	204.288.484.541	98,75
1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	92.022.299.000	90.437.669.683	25.906.614	90.411.763.069	98,25
<b>Total</b>	<b>475.903.216.000</b>	<b>468.549.952.876</b>	<b>1.618.142.665</b>	<b>466.931.810.211</b>	<b>98,11</b>

Tabel rincian Realisasi per jenis belanja berdasarkan kegiatan disajikan pada **Lampiran B.1**.

Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2019 sebesar Rp659.662.417.614 maka realisasi belanja Tahun 2020 sebesar Rp466.931.810.211 mengalami penurunan sebesar Rp192.730.607.403 atau 29,22%. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pemotongan anggaran dalam rangka refocusing anggaran percepatan penanggulangan Covid-19.
2. Pembatasan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
3. Adanya pegawai yang meninggal dunia
4. Adanya pegawai yang pensiun
5. Adanya pegawai yang mutasi
6. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini yang dibayarkan komponen gaji saja tidak dengan remunerasi

**Tabel B.2.3 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi Netto	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi Netto	Naik (Turun) (Rp)
		31 Desember 2020 (Rp)		31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Pegawai	20.288.729.000	19.889.420.216	21.395.550.000	20.027.724.209	(138.303.993)
Belanja Barang	450.327.655.000	441.788.078.525	639.569.170.000	621.340.775.249	(179.552.696.724)
Belanja Modal	5.286.832.000	5.254.311.470	18.741.944.000	18.293.918.156	(13.039.606.686)
<b>Jumlah</b>	<b>475.903.216.000</b>	<b>466.931.810.211</b>	<b>679.706.664.000</b>	<b>659.662.417.614</b>	<b>(192.730.607.403)</b>

**B.3. BELANJA PEGAWAI**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.889.420.21 dan Rp20.027.724.209. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp138.303.993 atau 0,69% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Adanya pegawai yang pensiun
2. Adanya pegawai yang mutasi
3. Adanya pegawai yang meninggal dunia
4. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini yang dibayarkan komponen gaji saja tidak dengan remunerasi

Jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan jabatan pegawai dapat dilihat pada **Lampiran B.3**

**Tabel B.3.1. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian Belanja Pegawai	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi Netto	Naik (Turun) (Rp)
	31 Desember 2020 (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	19.900.793.758	11.373.542	19.889.420.216	20.027.724.209	(138.303.993)
Belanja Gaji & Tunjangan Non PNS	0	0	0	0	0
Belanja Honorarium	0	0	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0	0	0
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>19.900.793.758</b>	<b>11.373.542</b>	<b>19.889.420.216</b>	<b>20.027.724.209</b>	<b>(138.303.993)</b>

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.1.**



#### B.4. BELANJA BARANG

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp335.932.228.822 dan Rp428.284.873.3561. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami penurunan 21,56% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Pemotongan anggaran dalam rangka *refocusing* anggaran percepatan penanggulangan Covid-19.
2. Pembatasan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

**Tabel B.4.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020**

Uraian Belanja Barang	Anggaran	Realisasi Netto	% Realisasi
Belanja Barang Operasional	11.976.930.000	11.855.288.655	98,98
Belanja Barang Non Operasional	104.173.969.000	99.799.727.594	95,80
Belanja Barang Persediaan	7.956.461.000	7.818.208.213	98,26
Belanja Jasa	10.955.672.000	10.522.519.266	96,05
Belanja Pemeliharaan	4.322.810.000	4.205.733.149	97,29
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	77.093.623.000	74.515.465.191	96,66
Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	170.720.000	166.839.645	97,73
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk	3.057.140.000	3.031.868.688	99,17
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	230.620.330.000	229.872.428.124	99,68
<b>Jumlah</b>	<b>450.327.655.000</b>	<b>441.788.078.525</b>	<b>98,10</b>

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp441.788.078.525 dan Rp621.340.775.249.

**Tabel B.4.2 Perbandingan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian Belanja Barang	31 Desember 2020			31 Desember 2019			Naik (Turun) (%)
	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Netto	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Barang Operasional	11.856.488.655	1.200.000	11.855.288.655	10.646.766.546		10.646.766.546	11,35
Belanja Barang Non Operasional	100.940.664.327	1.140.936.733	99.799.727.594	108.903.734.520	62.961.300	108.840.773.220	(8,31)
Belanja Barang Persediaan	7.818.208.213	0	7.818.208.213	12.718.419.390		12.718.419.390	(38,53)
Belanja Jasa	10.522.519.266	0	10.522.519.266	12.746.916.881	200.000	12.746.716.881	(17,45)

Belanja Pemeliharaan	4.205.733.149	0	4.205.733.149	4.568.321.950		4.568.321.950	(7,94)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	74.577.886.533	62.421.342	74.515.465.191	128.066.132.206	104.590.190	127.961.542.016	(41,77)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	170.673.717	3.834.072	166.839.645	1.955.702.255		1.955.702.255	(91,47)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.				15.830.778.323		15.830.778.323	(100,00)
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada Masy.	3.031.868.688	0	3.031.868.688	329.795.112		329.795.112	819,32
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masy.	230.265.555.100	393.126.976	229.872.428.124	326.943.622.216	1.201.662.660	325.741.959.556	(29,43)
	<b>443.389.597.648</b>	<b>1.601.519.123</b>	<b>441.788.078.525</b>	<b>622.710.189.399</b>	<b>1.369.414.150</b>	<b>621.340.775.249</b>	<b>(28,90)</b>

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2020 per mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran B.4.1.

### Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Satker Badan Ketahanan Pusat mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp6.057.734.000. Realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp5.794.586.930 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel B.4.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020**

AKUN	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	%
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.854.644.000	1.852.310.430	250.000	1.852.060.430	99,86
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.984.700.000	1.815.386.500		1.815.386.500	91,47
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	144.000.000	144.000.000		144.000.000	100,00
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.022.350.000	952.250.000		952.250.000	93,14
524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.052.040.000	1.049.040.000	18.150.000	1.030.890.000	97,99
<b>Grand Total</b>	<b>6.057.734.000</b>	<b>5.812.986.930</b>	<b>18.400.000</b>	<b>5.794.586.930</b>	<b>95,66</b>

Belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp5.794.586.930, digunakan antara lain untuk :

- Pembelian Masker/Hand sanitizer untuk seluruh pegawai BKP, tenaga kontrak dan pengunjung TTIC
- Penyemprotan Desinfektan Gedung dan Ruangan (Gedung Kantor, TTIC Pasar Minggu, TTIC Bogor dan Mobil)
- Penambahan daya Tahan Tubuh : pembelian multivitamin dan susu untuk Pegawai BKP dan Tenaga Kontrak
- Pembelian Peralatan Rapid Test Covid19 dan fasilitas pendukung dan SWAB untuk pegawai Badan Ketahanan Pangan dan tenaga kontrak.
- Honorarium narasumber /pembahas kegiatan/moderator pada saat pandemi Covid-19
- Biaya komunikasi
- Biaya makan dan snack dalam rangka WFO
- Biaya penggantian penanganan test karyawan suspect Covid-19
- Biaya transportasi untuk pegawai yang melaksanakan tugas Work From Office

### Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Belanja Mak 526 ini di anggarkan untuk mencapai Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan dan rawan pangan. Maka di TA. 2020 dianggarkan sebesar Rp233.677.470.000 yaitu dalam bentuk barang sebesar Rp5.377.470.000 dan dalam bentuk uang Rp228.300.000.000. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp232.904.296.812 yaitu realisasi dalam bentuk barang sebesar Rp5.342.440.588 dan realisasi berupa uang sebesar 227.561.856.224. Belanja Mak 526 dianggarkan untuk mendukung kegiatan sebagai berikut :

**Tabel B.4.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Mak 526 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020**

KETERANGAN	FISIK		KEUANGAN			
	ALOKASI	REALISASI	BANPEM BARANG		BANPEM UANG	
			PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan			4.257.140.000	4.230.175.688	68.660.000.000	68.544.006.224

<b>1814.112 Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen</b>				<b>3.057.140.000</b>	<b>3.031.868.688</b>		
526211 Banper Barang - TTIC	34	34	Propinsi	3.057.140.000	3.031.868.688		
<b>1814.114 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</b>				<b>1.200.000.000</b>	<b>1.198.307.000</b>	<b>68.660.000.000</b>	<b>68.544.006.224</b>
526311 Banper Barang - PUPM	12	12	Kelompok	1.200.000.000	1.198.307.000		
526312 Banper Uang - PUPM	857	857	Kelompok			56.660.000.000	56.544.006.224
526312 Banper Uang - LPM	300	299	Kelompok			12.000.000.000	12.000.000.000
<b>1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan</b>				<b>0</b>		<b>18.600.000.000</b>	<b>18.340.000.000</b>
<b>1815.117 Pengembangan Korporasi Usaha Tani</b>						<b>18.600.000.000</b>	<b>18.340.000.000</b>
526312 Banper Uang - PKU	65	65	Kelompok			2.600.000.000	2.600.000.000
526312 Banper Uang - Pertanian Keluarga	80	80	Kelompok			16.000.000.000	15.740.000.000
<b>1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>				<b>110.000.000</b>	<b>109.816.500</b>	<b>141.040.000.000</b>	<b>140.677.850.000</b>
<b>1816.109 Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga</b>				<b>10.000.000</b>	<b>9.950.000</b>	<b>139.690.000.000</b>	<b>139.345.000.000</b>
526311 Banper Barang - Peralatan Kantor untuk mendukung kegiatan	1	1	Propinsi	10.000.000	9.950.000		
526312 Banper Uang - P2L (KRPL)	3.961	3.938	Kelompok			139.690.000.000	139.345.000.000
<b>1816.110 Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Komsumsi Pangan</b>						<b>1.350.000.000</b>	<b>1.332.850.000</b>
526312 Banper Uang - PIPL	9	9	Kelompok			1.350.000.000	1.332.850.000
<b>1816.111 Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar</b>				<b>100.000.000</b>	<b>99.866.500</b>		
526312 Banper Barang - Fasilitas Packing House mendukung AEW	1	1	Lokasi	100.000.000	99.866.500		
<b>1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan</b>				<b>1.010.330.000</b>	<b>1.002.448.400</b>		
<b>1817.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>				<b>1.010.330.000</b>	<b>1.002.448.400</b>		
526311 Banper Barang - Agro Edu Wisata (AEW)	5	5	Lokasi	1.000.000.000	992.448.400		
526311 Banper Barang - Peralatan Kantor untuk mendukung kegiatan	1	1	Propinsi	10.330.000	10.000.000		
<b>Grand Total</b>				<b>5.377.470.000</b>	<b>5.342.440.588</b>	<b>228.300.000.000</b>	<b>227.561.856.224</b>

## 1. PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, danantisipasi kebutuhan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

Berikut Pagu dan Realisasi anggaran per output kegiatan :

KETERANGAN	ALOKASI	REALISASI	BANPEM BARANG		BANPEM UANG	
			PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
<b>1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan</b>			<b>4.257.140.000</b>	<b>4.230.175.688</b>	<b>68.660.000.000</b>	<b>68.544.006.224</b>
<b>1814.112 Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen</b>			<b>3.057.140.000</b>	<b>3.031.868.688</b>		
526211 Banper Barang - TTIC	34 Propinsi	34 Propinsi	3.057.140.000	3.031.868.688		
<b>1814.114 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</b>			<b>1.200.000.000</b>	<b>1.198.307.000</b>	<b>68.660.000.000</b>	<b>68.544.006.224</b>
526311 Banper Barang - PUPM	12 Kelompok	12 Kelompok	1.200.000.000	1.198.307.000		
526312 Banper Uang - PUPM	857 Kelompok	857 Kelompok			56.660.000.000	56.544.006.224
526312 Banper Uang - LPM	300 Kelompok	299 Kelompok			12.000.000.000	12.000.000.000

Dana Bantuan tersebut di berikan untuk membantu pelaksanaan kegiatan : (1)Lumbung Pangan Masyarakat (2) Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen dan (3) Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat - Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI)

- **Lumbung Pangan Masyarakat**

Kegiatan LPM melalui APBN TA 2020 difokuskan untuk pengisian LPM tahap pengembangan yang dibangun melalui DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2014 dan/atau DAK tahun sebelumnya yang sudah pernah mendapat 1 (satu) kali Banper atau belum pernah. Sedangkan untuk 163 LPM yang pembangunannya dibiayai DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2019, fasilitasi pengisian bersumber dari APBD.

Pengembangan LPM bertujuan untuk meningkatkan volume cadangan pangan kelompok dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui fasilitasi

pemberian Bantuan Pemerintah (Banper) pada kelompok LPM untuk pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif.

Sasaran Kegiatan Pengembangan LPM TA 2020 adalah 300 (tiga ratus) kelompok penerima manfaat di 28 (dua puluh delapan) provinsi yang tersebar di 120 (seratus dua puluh) kabupaten/kota. Kelompok ini merupakan penerima manfaat pembangunan LPM melalui anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2014 dan/atau DAK tahun sebelumnya yang sudah pernah mendapat 1 (satu) kali Banper melalui APBN untuk pengisian cadangan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Pengembangan LPM TA 2020 No. 84/KPTS/RC.110/J/12/2019

Anggaran dan Realisasi kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam bentuk uang per satker adalah sebagai berikut :

No	PROPINSI	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	%
1	039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	20 Kelompok	20 Kelompok	800.000.000	800.000.000	100,00
2	049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA	7 Kelompok	7 Kelompok	280.000.000	280.000.000	100,00
3	059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	6 Kelompok	6 Kelompok	240.000.000	240.000.000	100,00
4	069027 DINAS PANGAN ACEH	10 Kelompok	10 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
5	079318 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	14 Kelompok	13 Kelompok	560.000.000	560.000.000	100,00
6	089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	22 Kelompok	22 Kelompok	880.000.000	880.000.000	100,00
7	109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	10 Kelompok	10 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00

8	119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	26 Kelom pok	26 Kelom pok	1.040.000.000	1.040.000.000	100,00
9	129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG	34 Kelom pok	34 Kelom pok	1.360.000.000	1.360.000.000	100,00
10	139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	14 Kelom pok	14 Kelom pok	560.000.000	560.000.000	100,00
11	149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 Kelom pok	5 Kelom pok	200.000.000	200.000.000	100,00
12	159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	11 Kelom pok	11 Kelom pok	440.000.000	440.000.000	100,00
13	179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	8 Kelom pok	8 Kelom pok	320.000.000	320.000.000	100,00
14	189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	10 Kelom pok	10 Kelom pok	400.000.000	400.000.000	100,00
15	199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	10 Kelom pok	10 Kelom pok	400.000.000	400.000.000	100,00
16	209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	10 Kelom pok	10 Kelom pok	400.000.000	400.000.000	100,00
17	219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	6 Kelom pok	6 Kelom pok	240.000.000	240.000.000	100,00
18	229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	7 Kelom pok	7 Kelom pok	280.000.000	280.000.000	100,00
19	239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA	23 Kelom pok	23 Kelom pok	920.000.000	920.000.000	100,00

	TENGGARA BARAT					
20	249020 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14 Kelom pok	14 Kelom pok	560.000.000	560.000.000	100,00
21	269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	4 Kelom pok	4 Kelom pok	160.000.000	160.000.000	100,00
22	289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	3 Kelom pok	3 Kelom pok	120.000.000	120.000.000	100,00
23	299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	7 Kelom pok	7 Kelom pok	280.000.000	280.000.000	100,00
24	309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5 Kelom pok	5 Kelom pok	200.000.000	200.000.000	100,00
25	319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	6 Kelom pok	6 Kelom pok	240.000.000	240.000.000	100,00
26	320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2 Kelom pok	2 Kelom pok	80.000.000	80.000.000	100,00
27	340161 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	3 Kelom pok	3 Kelom pok	120.000.000	120.000.000	100,00
28	417679 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	3 Kelom pok	3 Kelom pok	120.000.000	120.000.000	100,00
	<b>Grand Total</b>	<b>300 Kelo mpok</b>	<b>299 Kelom pok</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

- Terdapat selisih antara realisasi fisik dan keuangan. Hal ini disebabkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara terdapat Retur SP2D No. 200041301001644 tertanggal 20 Mei 2020 dengan No. transaksi 200041301001644000001 atas kelompok LPM Bina Lestari (Tahap Pemantapan 2020), Kab. Langkat sebesar Rp40.000.000 yang telah disetorkan ke Bank Indonesia



dikarenakan rekening kelompok tidak aktif sehingga tidak dapat di proses dan tidak ada realokasi kembali. Surat dan Retur terlampir.

- Terdapat sisa dana LPM Tahun 2020 yang baru disetorkan di tahun 2021, oleh kelompok Batu Putih, Desa Buto, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara sebesar Rp29.904.000 di setorkan tanggal 23 Maret 2021; NTPN : 42AC07QLTSVHT7KO.

- **Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat – Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI)**

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik, serta menjadi instrumen Pemerintah untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah maupun kurang.

Pada Tahun 2020, kegiatan PUPM tidak hanya untuk komoditas beras tetapi diperluas komoditasnya termasuk cabai, bawang merah, dan telur. Perluasan komoditas tersebut dilakukan dengan memperhatikan permasalahan selama ini terkait fluktuasi harga pada komoditas tersebut yang sering terjadi sepanjang tahun, dan tingginya disparitas harga baik antar konsumen dengan produsen maupun antar wilayah.

Dana bantuan pemerintah Kegiatan PUPM tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. LUPM Tahap Penumbuhan

1) LUPM Komoditas Beras

Bantuan pemerintah diberikan sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) per LUPM dengan rincian sebagai berikut: (1) bantuan pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk pengadaan mesin pendukung produksi dan pengolahan gabah menjadi beras berupa Rice Milling Unit (husker/rice polisher/dryer/eskalator/separator/mesin penggerak) dan alat pendukung lainnya (sealer/timbangan/alat jahit kemasan/ vacum sealer/alat tes kadar air dan lainnya) (2) bantuan Pemerintah sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk dana operasional

2) LUPM Komoditas Cabai

Bantuan Pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk LUPM Cabai digunakan untuk biaya operasional seperti: (1) cash of work (HOK) (tenaga kerja untuk petik, sortasi, angkut/bongkar muat, pengemasan, dan lain-lain), (2) kemasan, dan (3) biaya transportasi/ekspedisi

3) LUPM Komoditas Bawang Merah

Bantuan Pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk LUPM bawang merah digunakan untuk biaya operasional seperti: (1) cash of work (HOK) (tenaga kerja untuk cabut dari lahan, sortasi, angkut/bongkar muat, pengemasan, dan lain-lain), (2) kemasan, (3) biaya transportasi/ekspedisi

4) LUPM Komoditas Telur Ayam

Bantuan Pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk LUPM telur ayam (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya seperti: 1) cash of work (HOK) (tenaga kerja untuk pungut, sortasi, pengemasan, dan lainlain), 2) transportasi/ekspedisi, tray.

b. LUPM Tahap Pengembangan

Penerima manfaat pelaksanaan kegiatan PUPM yang ditumbuhkan pada Tahun 2019 dan memperoleh dana operasional sebesar Rp 60.000.000.

c. LUPM Tahap pembinaan

Penerima manfaat pelaksanaan kegiatan PUPM yang ditumbuhkan pada Tahun 2018 dan memperoleh dana operasional sebesar Rp 60.000.000.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) No. 85m/KPTS/RC.110/J/12/2019

Pagu dan Realisasi Anggaran untuk Banper Uang – PUPM per propinsi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 , sebagai berikut :

No	Prop insi	LUPM Tahap Penumbuhan		Tahap Pengembangan		Tahap Pembinaan		TOTAL	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	JAB AR	0	0	1.620.000	1.620.000	2.880.000	2.880.000	4.500.000	4.500.000
2	JATE NG	3.580.000	3.580.000	2.520.000	2.520.000	3.720.000	3.720.000	9.820.000	9.820.000
3	DIY	800.000	800.000	1.020.000	1.020.000	600.000	600.000	2.420.000	2.420.000
4	JATI M	2.760.000	2.760.000	1.200.000	1.200.000	1.380.000	1.380.000	5.340.000	5.340.000

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Tahunan Tahun 2020 (Audited)

5	ACE H	0	0	60.000	60.000	300.000	300.000	360.000	360.000
6	SUM UT	0	0	1.140.000	1.140.000	1.200.000	1.200.000	2.340.000	2.340.000
7	SUM BAR	920.000	920.000	600.000	600.000	240.000	240.000	1.760.000	1.760.000
8	RIAU	180.000	180.000	480.000	480.000	0	0	660.000	660.000
9	JAM BI	540.000	540.000	720.000	720.000	0	0	1.260.000	1.260.000
10	SUM SEL	940.000	940.000	660.000	660.000	1.620.000	1.620.000	3.220.000	3.220.000
11	LAM PUN G	420.000	420.000	1.740.000	1.740.000	2.160.000	2.160.000	4.320.000	4.320.000
12	KAL BAR	120.000	120.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.320.000	1.320.000
13	KAL TEN G	120.000	120.000	300.000	300.000	0	0	420.000	420.000
14	KAL SEL	780.000	780.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.020.000	1.020.000
15	SUL UT	940.000	940.000	240.000	240.000	0	0	1.180.000	1.180.000
16	SUL TEN G	180.000	180.000	480.000	480.000	0	0	660.000	660.000
17	SUL SEL	2.980.000	2.980.000	2.700.000	2.700.000	2.880.000	2.880.000	8.560.000	8.560.000
18	BALI	220.000	220.000	420.000	420.000	480.000	480.000	1.120.000	1.120.000
19	NTB	1.380.000	1.380.000	420.000	420.000	360.000	360.000	2.160.000	2.160.000
20	BEN GKU LU	520.000	520.000	480.000	480.000	0	0	1.000.000	1.000.000
21	BAN TEN	300.000	300.000	780.000	780.000	660.000	660.000	1.740.000	1.740.000
22	GOR ONT ALO	280.000	280.000	720.000	720.000	480.000	480.000	1.480.000	1.480.000
	<b>Total</b>	<b>17.960.000</b>	<b>17.960.000</b>	<b>19.020.000</b>	<b>19.020.000</b>	<b>19.680.000</b>	<b>19.680.000</b>	<b>56.660.000</b>	<b>56.660.000</b>

Realisasi fisik PUPM, sebagai berikut :

No	Provinsi	Jumlah LUPM Tahap Penumbuhan				Tahap Pengemban gan	Tahap Pembinaa n	TOTAL
		LUPM Beras	LUPM Cabai	LUPM Bawang	LUPM Telur			

		A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R
1	JABAR	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	48	48	75	75
2	JATENG	8	8	7	7	10	10	14	14	42	42	62	62	143	143
3	DIY	5	5	3	3	2	2	0	0	17	17	10	10	37	37
4	JATIM	6	6	11	11	9	9	4	4	20	20	23	23	73	73
5	ACEH									1	1	5	5	6	6
6	SUMUT	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	20	20	39	39
7	SUMBAR	2	2	8	8	0	0	0	0	10	10	4	4	24	24
8	RIAU	3	3	0	0	0	0	0	0	8	8			11	11
9	JAMBI	4	4	3	3	0	0	0	0	12	12			19	19
10	SUMSEL	9	9	4	4	0	0	0	0	11	11	27	27	51	51
11	LAMPUNG	7	7	0	0	0	0	0	0	29	29	36	36	72	72
12	KALBAR	2	2	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	22	22
13	KALTENG	2	2	0	0	0	0	0	0	5	5			7	7
14	KALSEL	3	3	2	2	4	4	0	0	2	2	2	2	13	13
15	SULUT	4	4	7	7	0	0	0	0	4	4			15	15
16	SULTENG	3	3	0	0	0	0	0	0	8	8			11	11
17	SULSEL	8	8	5	5	11	11	9	9	45	45	48	48	126	126
18	BALI	2	2	0	0	0	0	1	1	7	7	8	8	18	18
19	NTB	3	3	2	2	10	10	0	0	7	7	6	6	28	28
20	BENGKULU	2	2	4	4	0	0	0	0	8	8			14	14
21	BANTEN	5	5	0	0	0	0	0	0	13	13	11	11	29	29
22	GORONTAL O	3	3	0	0	0	0	1	1	12	12	8	8	24	24
<b>TOTAL</b>		<b>81</b>	<b>81</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>857</b>	<b>857</b>

Ket : A = Alokasi (kelompok) , R = Realisasi (kelompok)

Terdapat pengembalian dana pada Tahun 2020 pada :

- 039427 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Sebesar Rp6.088.176
- 079318 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Sebesar Rp4.644.000
- 159192 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Sebesar Rp40.840.000, 199374 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Sebesar Rp44.414.800
- 319005 Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Sebesar Rp16.800

Belanja 526 dalam bentuk barang diberikan berupa sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan TTIC (Freezer, Showcase lemari pendingin, Mesin kasir, timbangan digital, tenda lipat, cctv, tv, camera, komputer, mic wireless, speaker active, toa, dispenser, peralatan listrik, genset, dll) yang diberikan kepada 34 Propinsi dan mesin pendukung produksi dan pengolahan gabah menjadi beras berupa Rice Milling Unit (husker/rice polisher/dryer/eskalator/ separator/mesin penggerak) dan alat pendukung lainnya (sealer/timbangan/alat jahit kemasan/ vacuum sealer/alat tes kadar air dan lainnya diberikan kepada 12 kelompok di 5 propinsi.

Berikut Pagu dan Realisasi Anggaran untuk Banper Barang – TTIC dan PUPM sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 :

No	Keterangan	Pagu	Realisasi	%
	<b>1814.112 Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen Banper Barang TTIC</b>	<b>3.057.140.000</b>	<b>3.031.868.688</b>	<b>99,17</b>
1	019032 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	80.000.000	79.882.000	99,85
2	029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	80.000.000	79.647.100	99,56
3	039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	100.000.000	99.635.000	99,64
4	049037 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	98.500.000	97.650.000	99,14
5	059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	40.000.000	39.930.000	99,83
6	069027 DINAS PANGAN ACEH	80.000.000	79.740.000	99,68
7	079318 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	59.900.000	59.418.500	99,20
8	089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	158.700.000	158.610.000	99,94
9	099426 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	80.000.000	80.000.000	100,00
10	109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	40.000.000	40.000.000	100,00
11	119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	170.200.000	167.979.900	98,70
12	129224 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	80.000.000	80.000.000	100,00
13	139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	240.000.000	239.677.000	99,87
14	149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40.000.000	40.000.000	100,00
15	159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	176.050.000	176.050.000	100,00
16	169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	180.000.000	179.920.000	99,96
17	179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	150.000.000	149.580.000	99,72
18	189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	68.600.000	68.600.000	100,00
19	199374 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	80.000.000	79.985.000	99,98
20	209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	23.000.000	23.000.000	100,00

21	219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	40.000.000	40.000.000	100,00
22	229164 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	40.000.000	39.998.575	100,00
23	239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	96.900.000	96.900.000	100,00
24	249020 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	84.000.000	74.900.650	89,17
25	259022 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	40.000.000	40.000.000	100,00
26	269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	100.000.000	89.607.500	89,61
27	289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	40.000.000	40.000.000	100,00
28	299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	40.000.000	40.000.000	100,00
29	309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	210.260.000	210.260.000	100,00
30	319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	90.480.000	90.478.850	100,00
31	320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	143.250.000	143.137.500	99,92
32	339029 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	40.000.000	40.000.000	100,00
33	340161 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	27.300.000	27.300.000	100,00
34	417679 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	40.000.000	39.981.113	99,95
	<b>1814.114 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Banper Barang PUPM</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.198.307.000</b>	<b>99,86</b>
1	139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	200.000.000	199.849.000	99,92
2	149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	200.000.000	199.700.000	99,85
3	159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	300.000.000	299.750.000	99,92
4	229164 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	200.000.000	199.500.000	99,75
5	319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	300.000.000	299.508.000	99,84

## 2. PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN

Keterangan	Alokasi	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
<b>1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan</b>	<b>145 kelompok</b>	<b>145 kelompok</b>	<b>18.600.000.000</b>	<b>18.340.000.000</b>	<b>98,60</b>
Banper Uang - PKU	65 Kelompok	65 Kelompok	2.600.000.000	2.600.000.000	100,00
Banper Uang - Pertanian Keluarga	80 kelompok	80 kelompok	16.000.000.000	15.740.000.000	98,38

• **PENGEMBANGAN KORPORASI USAHATANI (PKU)**

Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) di daerah rentan rawan pangan didefinisikan sebagai kegiatan usahatani dari hulu dan hilir yang dijalankan secara terintegrasi pada satu atau lebih tahapan pengolahan untuk menghasilkan produk pangan dan non pangan dan diharapkan menjadi lembaga usaha yang berbadan hukum.

Tujuannya yaitu : a) meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompok tani dan gapoktan; b) meningkatkan pendapatan. Dengan sasaran PKU Tahap Pengembangan Tahun 2020 merupakan kelanjutan dari kegiatan PKU Tahap Penumbuhan Tahun 2019 di 13 lokasi pada daerah rentan rawan pangan yang mempunyai potensi sumber daya pangan untuk pengembangan usaha berdasarkan data FSVA Nasional 2018 prioritas 3, 4 dan 5 dan atau persentase Rumah Tangga Miskin Petani (RTM-P) >20% dan atau daerah stunting berdasarkan data hasil pemantauan Situasi Pangan dan Gizi (PSG) tahun 2017, Kementerian Kesehatan (indikator FSVA Nasional 2018). Pada tahun 2020 kegiatan PKU memasuki tahap pengembangan dimana kegiatannya hanya di budidaya sehingga bantuan pemerintah yang diberikan hanya pada kelompok untuk kegiatan budidaya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) No. 86/KPTS/RC.110/J/12/2019.

Berikut Pagu dan Realisasi Anggaran per satker sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 :

No	PROVINSI	LOKASI PKU	Jumlah Kelompok	PAGU	REALISASI	%
1	029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
2	039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
3	049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
6	079318 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
9	109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
11	129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00

18	199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
21	229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
23	249020 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
25	269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
27	299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	1	5	200.000.000	200.000.000	100,00
22	239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2	10	400.000.000	400.000.000	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>65</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>100,00</b>

- Terdapat sisa dana PKU Tahun 2020 yang baru disetorkan di tahun 2021 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp97.760.000 yang disetorkan tanggal 18 Januari 2021 dengan NTPN : B8BC155DED2778HF. Setoran tersebut berasal dari Kelompok Tani Simpatik Rp25.800.000, Kelompok Tani Harapan Baru Rp25.800.000, Kelompok Tani Daya Karya Rp25.800.000, Kelompok Tani Daya Karya Rp25.800.000, Kelompok Tani Kelompok Tani Nekmese Rp20.360.000

- **PERTANIAN KELUARGA (PK)**

Kegiatan Pertanian Keluarga (PK) merupakan kegiatan bantuan pemerintah sebagai trigger, yang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang dan akan peningkatan status daerah rentan rawan pangan menjadi tahan pangan dan daerah yang sudah tahan pangan tidak menurun statusnya menjadi rentan rawan pangan serta meningkatkan pendapatan keluarga.

Kegiatan PK bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga petani yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang, mengentaskan



wilayah rentan rawan pangan, menguatkan wilayah tahan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani.

Sasaran kegiatan Pertanian Keluarga sebanyak 80 lokasi desa berdasarkan indeks komposit terendah dan/atau Persentase tertinggi penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada penerima manfaat untuk usaha budidaya senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) No. 827/KPTS/RC.220/J/04/2020.

Pagu dan Realisasi Anggaran per satker sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 :

No	PROVINSI	ALOKASI	REALISASI	PAGU	REALISASI	%
1	029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
2	039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	3 Kelompok	3 Kelompok	600.000.000	600.000.000	100,00
3	049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
4	059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	3 Kelompok	3 Kelompok	600.000.000	600.000.000	100,00
5	069027 DINAS PANGAN ACEH	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
6	079318 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
7	089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
8	099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
9	109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
10	119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
11	129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
12	139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3 Kelompok	3 Kelompok	600.000.000	600.000.000	100,00
13	149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00

14	159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
15	169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3 Kelompok	3 Kelompok	600.000.000	600.000.000	100,00
16	179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
17	189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
18	199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	4 Kelompok	4 Kelompok	800.000.000	800.000.000	100,00
19	209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2 Kelompok	1 Kelompok	400.000.000	200.000.000	50,00
20	219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	4 Kelompok	4 Kelompok	800.000.000	800.000.000	100,00
21	229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
22	239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
23	249020 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3 Kelompok	3 Kelompok	600.000.000	600.000.000	100,00
24	259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA	4 Kelompok	4 Kelompok	800.000.000	800.000.000	100,00
25	269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
26	289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	4 Kelompok	4 Kelompok	800.000.000	740.000.000	92,50
27	299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	3 Kelompok	3 Kelompok	600.000.000	600.000.000	100,00
28	309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
29	319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
30	320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
31	339029 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00

32	340161 DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
33	417679 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2 Kelompok	2 Kelompok	400.000.000	400.000.000	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>80 Kelompok</b>	<b>79 Kelompok</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>15.740.000.000</b>	<b>98,38</b>

- Rekap Komoditas Kegiatan Pertanian Keluarga disajikan pada Lampiran B.4.2
- Pada Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 1 (satu) kelompok yaitu kelompok Tani Cemara Desa Lanto Kecamatan Mawasangka Tengah tidak dapat melanjutkan kegiatan dikarenakan kondisi alam lokasi yang tidak memungkinkan untuk usaha budidaya tanaman, ternak dan perikanan sesuai dengan petunjuk teknis Pertanian Keluarga (PK).
- Terdapat pengembalian dana pada Tahun 2020 pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dari kelompok Tani Jaya Rp30.000.000 dan kelompok Tani Liang Sia Rp30.000.000.

### 3. PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Pagu dan Realisasi per kegiatan sampai dengan 31 Desember 2020 :

KETERANGAN	ALOKASI	REALISASI	BANPEM BARANG		BANPEM UANG	
			PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
<b>1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>			<b>110.000.000</b>	<b>109.816.500</b>	<b>141.040.000.000</b>	<b>140.677.850.000</b>
<b>1816.109 Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga</b>			<b>10.000.000</b>	<b>9.950.000</b>	<b>139.690.000.000</b>	<b>139.345.000.000</b>
526311 Banper Barang - Peralatan Kantor untuk mendukung kegiatan	1 Propinsi	1 Propinsi	10.000.000	9.950.000		
526312 Banper Uang - P2L (KRPL)	3.961 Kelompok	3.961 Kelompok			139.690.000.000	139.345.000.000
<b>1816.110 Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi Pangan</b>					<b>1.350.000.000</b>	<b>1.332.850.000</b>
526312 Banper Uang - PIPL	9 Kelompok	9 Kelompok			1.350.000.000	1.332.850.000
<b>1816.111 Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar</b>			<b>100.000.000</b>	<b>99.866.500</b>		
526312 Banper Barang - Fasilitas Packing House mendukung AEW	1 Kelompok	1 Kelompok	100.000.000	99.866.500		

- **PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA MELALUI PEKARANGAN PANGAN LESTARI**

Pada tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/ atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Kegiatan P2L dilaksanakan dengan sasaran lokasi sebagai berikut:

1. Tahap Penumbuhan di 1.897 kelompok penerima manfaat pada kabupaten/kota daerah prioritas stunting, dan/ atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan, dan/atau pemantapan daerah tahan pangan yang terdiri dari 3 zonasi, sebagai berikut :

Zona 1 : Provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bali. Alokasi dana bantuan sebesar Rp50.000.000/kelompok

Zona 2 : a. Provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung); b. Provinsi di Pulau Kalimantan (kecuali Provinsi Kalimantan Utara); c. Provinsi di Pulau Sulawesi; d. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alokasi dana bantuan sebesar Rp60.000.000/kelompok.

Zona 3 : Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat. Alokasi dana bantuan sebesar Rp75.000.000/kelompok.

Pembagian zonasi tersebut dilakukan berdasarkan atas perbedaan harga antar wilayah, baik harga barang fasilitas untuk pembangunan kebun bibit, pengembangan demplot, harga bibit dan/atau benih, biaya operasional serta fasilitas dan/atau bahan pendukung lainnya. Komponen kegiatan Tahap Penumbuhan terdiri atas (1) kebun bibit, (2) demplot, (3) pertanaman, dan (4) pasca panen dan pemasaran

2. Tahap Pengembangan pada 2.024 kelompok penerima manfaat pada kabupaten/kota daerah prioritas stunting, daerah rentan rawan pangan, dan daerah perbatasan yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Alokasi dana bantuan pemerintah Tahap Pengembangan sebesar Rp.15.000.000/kelompok. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan kapasitas pengembangan ternak (unggas), pertanaman dan demplot untuk mendukung kegiatan penyediaan, pemanfaatan, meningkatkan fungsi

dan kapasitas kebun bibit, demplot, dan pertanaman, serta melaksanakan kegiatan pasca panen dan pemasaran pangan oleh kelompok P2L.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) No. 87/KPTS/RC.110/J/12/2019.

Berikut Pagu dan Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 :

No	Satker	TOTAL FISIK		TOTAL		
		Alokasi (kelompok)	Realisasi (kelompok)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1	019032 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	12	12	390.000.000	390.000.000	100,00
2	029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	302	302	10.480.000.000	10.480.000.000	100,00
3	039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	342	342	10.660.000.000	10.660.000.000	100,00
4	049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA	43	43	1.275.000.000	1.275.000.000	100,00
5	059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	336	336	11.830.000.000	11.830.000.000	100,00
6	069027 DINAS PANGAN ACEH	154	154	6.810.000.000	6.810.000.000	100,00
7	079318 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	85	85	2.715.000.000	2.715.000.000	100,00
8	089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	160	160	6.000.000.000	6.000.000.000	100,00
9	099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU	111	111	3.735.000.000	3.735.000.000	100,00
10	109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	90	90	3.150.000.000	3.150.000.000	100,00
11	119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	142	135	4.720.000.000	4.705.000.000	99,68
12	129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG	155	155	5.055.000.000	5.055.000.000	100,00
13	139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	138	138	5.535.000.000	5.535.000.000	100,00
14	149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	79	79	3.165.000.000	3.165.000.000	100,00

15	159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	90	90	3.150.000.000	3.150.000.000	100,00
16	169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	74	74	2.820.000.000	2.820.000.000	100,00
17	179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	114	114	4.050.000.000	4.050.000.000	100,00
18	189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	89	89	3.225.000.000	3.225.000.000	100,00
19	199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	214	214	8.880.000.000	8.880.000.000	100,00
20	209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	118	109	5.010.000.000	5.010.000.000	100,00
21	219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	61	61	2.355.000.000	2.355.000.000	100,00
22	229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	70	70	2.380.000.000	2.380.000.000	100,00
23	239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	130	130	4.470.000.000	4.470.000.000	100,00
24	249020 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	210	209	7.590.000.000	7.590.000.000	100,00
25	259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA	157	136	3.915.000.000	3.600.000.000	91,95
26	269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	74	74	2.370.000.000	2.370.000.000	100,00
27	289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	72	72	3.120.000.000	3.120.000.000	100,00
28	299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	70	70	2.240.000.000	2.240.000.000	100,00
29	309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	48	48	1.350.000.000	1.350.000.000	100,00
30	319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	68	68	2.190.000.000	2.175.000.000	99,32
31	320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	37	37	555.000.000	555.000.000	100,00
32	339029 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	26	26	750.000.000	750.000.000	100,00
33	340161 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	67	67	2.805.000.000	2.805.000.000	100,00

34	417679 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	23	23	945.000.000	945.000.000	100,00
<b>Grand Total</b>		<b>3.961</b>	<b>3.851</b>	<b>139.690.000.000</b>	<b>139.345.000.000</b>	<b>99,75</b>

Tabel rincian Alokasi dan Realisasi Fisik dan Alokasi dan Realisasi Rupiah per tahap penumbuhan dan pengembangan kegiatan disajikan pada Lampiran B.4.3

- Pada P2L tahap Penumbuhan tidak terdapat kelompok yang tidak mencairkan.
- Pada KRPL tahap Pengembangan terdapat 23 kelompok penerima yang tidak mencairkan yaitu:
  - di Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 kelompok, yaitu Kelompok Tani Berkah di Kabupaten Lahat di karenakan kelompok tidak memiliki areal yang cukup untuk melaksanakan kegiatan P2L
  - di Propinsi Papua sebanyak 21 Kelompok yaitu Kelompok Woge Bou, Subur Enaimo Berkembang Sinar (Kabupaten Paniai), Beam Wingguname Kumbur Missa Kimilo Kanggi Noreluk Wakaok Kubumanggen (Kabupaten Tolikara); Wayani, Mangga, Pisang,Soma, Manunggal Lestari, Nahire Numeherasi Legare Lestari (Kabupaten Nabire) dikarenakan adanya konflik dalam kelompok yang berkepanjangan, anggota kelompok sudah tidak aktif dan susah untuk dibina kembali serta pendamping kelompok sudah tidak aktif sehingga menyulitkan dalam pengumpulan data/dokumentasi pelaksanaan kegiatan dilapangan.
  - Di Provinsi Gorontalo sebanyak 1 kelompok yaitu Kelompok Nusa Indah di Kabupaten Bone Bolango dikarenakan manajemen internal kelompok serta kerja sama antar anggota tidak efektif.
- Terdapat sisa dana P2L/KRPL Tahun 2020 yang baru disetorkan di tahun 2021 sebesar Rp168.964.500, sebagai berikut:
  - KWT Sildoki, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Rp. 15.000.000,00 disetorkan tanggal 26 Januari 2021 NTPN 259F02G4UTBC6AH6
  - KWT PKT, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Rp. 15.000.000,00 disetorkan tanggal 26 Januari 2021 NTPN EBDB78N3DNC31C2F
  - KWT Bintang Sembilan Kabupaten Jombang, Jawa Timur Rp 5.000.000 disetorkan tanggal 2 Februari 2021 NTPN : 925EC3CIEO01LLFN
  - KWT Dewi Sekarputih, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Rp. 10.000.000 disetorkan tanggal 2 Februari 2021 NTPN : 437FD61QU7N6SJRJRU

- KWT Sirih, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Rp. 100.000,00 di setorkan tanggal 15 Januari 2021 NTPN : 5CB331JNF20KIE47
- KWT Sejahtera, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara Rp. 10.000.000,00 di setorkan tanggal 07 Januari 2021 NTPN : 5B22AGU8E26NMQGP
- KWT Kembang Sari Kab. TTU, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp13.000.000 di setorkan tanggal 3 Februari 2020 NTPN : 691958N3DNEC38RH
- KWT Nekamnaut Kab. TTU, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp3.000.000 di setorkan tanggal 3 Februari 2020 NTPN : 70D3F55DED4QFAJB
- KWT Mnelalete Kab. TTS, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp33.140.000 di setorkan tanggal 3 Februari 2020 NTPN : A66DD7QLTSRVMBKS
- KWT Sejahtera Kab. TTS, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7.900.000 di setorkan tanggal 3 Februari 2020 NTPN : C4FBA7QLTSRVM84
- KWT Oemathonis Kab. TTS, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp8.412.500 di setorkan tanggal 3 Februari 2020 NTPN : 17A2C2G4UTDL8EJM
- KWT Bersehati Kab. TTS, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7.900.000 di setorkan tanggal 3 Februari 2020 NTPN : DD6603CIEO01LFCN
- KWT. Fetomone, Kupang, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp4.112.000 di setorkan tanggal 2 Maret 2021 NTPN : 434818N3DNHAHNA5
- KWT.Mandiri I , Nagekeo, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp15.000.000 di setorkan tanggal 2 Maret 2021 NTPN : 4CAB255DED7OUBAB
- KWT.Bife Meto, TTS, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7.900.000 disetorkan tanggal 2 Maret 2021 NTPN : 546BE8N3DNHAIDHD
- Kelompok Tani Harapan Kampung Jaifuri, Kecamatan Skanto Kab.Keerom, Papua sebesar Rp6.750.000, disetorkan tanggal 23 Februari 2021 NTPN : 9ED9D0N9V89AU8JM.
- Kelompok Tani Tani Cenderawasih Jaya, Kecamatan Skanto Kab.Keerom, Papua sebesar Rp6.750.000 disetorkan tanggal 26 Februari 2021 NTPN : 0D8CD0N9V89I6UGE

Terdapat pagu belanja 526311 berupa barang sebesar Rp10.000.000 dan realisasi sebesar Rp9.950.000 pada belanja barang masing sebesar Rp9.950.000 pada satker 049037 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berupa Scanner, Hardisk dan Mouse, yang di pergunakan untuk proses penyusunan laporan kegiatan P2L.



- **Pengembangan Pangan Lokal melalui Pengembangan Industri Pangan Lokal(PIPL)**

Kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) merupakan kegiatan prioritas dalam upaya penyediaan bahan baku industri olahan pangan berbasis tepung lokal, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses pasar.

Tujuan kegiatan PIPL adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tepung local dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM

Sasaran kegiatan PIPL tahun 2020 yaitu 9 kelompok PIPL yang telah ditumbuhkan tahun 2019 dengan mendapat alokasi dana bantuan sebesar Rp150.000.000/kelompok

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) No. 87/KPTS/RC.110/J/12/2019.

Berikut Pagu dan Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 :

No	Satker	TOTAL FISIK		TOTAL		
		Alokasi (kelompok)	Realisasi (kelompok)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1	039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	1	1	150.000.000	150.000.000	100,00
2	099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU	1	1	150.000.000	150.000.000	100,00
3	129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG	1	1	150.000.000	150.000.000	100,00
4	199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	1	1	150.000.000	136.700.000	91,13
5	219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	1	1	150.000.000	150.000.000	100,00
6	249020 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	150.000.000	150.000.000	100,00
7	259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1	1	150.000.000	150.000.000	100,00
8	319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	1	1	150.000.000	150.000.000	100,00
9	320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1	1	150.000.000	146.150.000	97,43
	<b>Grand Total</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.332.850.000</b>	<b>98,73</b>

- Terdapat pengembalian dana pada Tahun 2020, sebagai berikut :
  - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan : Kelompok KUB Mamminasate'ne sebesar Rp 13.300.000 di setorkan tanggal 30 Desember 2020, NTPN : 18B6261QTVBQ4VBM
  - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan provinsi Kepulauan Riau : Kelompok UMKM Usaha Sagu Sinar sebesar Rp 3.850.000 di setorkan tanggal 3 Desember 2020 NTPN : 690398N3DEVUL90T.
- Terdapat sisa dana PIPL Tahun 2020 yang baru disetorkan di tahun 2021, sebagai berikut :
  - Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau, Kelompok UKM Kulim Jaya sebesar Rp 15.000.000 di setorkan tanggal 13 Januari 2021 ; NTPN : 6CADC6U8E26ST8LJ
  - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kelompok KUB Rizki Cassava sebesar Rp 33.507.875 di setorkan tanggal 26 Januari 2021 ; NTPN : BDEC155DED2HEDKN
  - Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Gapoktan Muda Mandiri Kab. Kupang sebesar Rp21.020.000 di setorkan tanggal 5 Februari 2021 NTPN : BC3EF0N9V88UJSG8

- **Fasilitasi Packing House mendukung AEW**

Pada Tahun 2020 Kementerian Pertanian mengembangkan program Agro Edu Wisata (AEW) sebagai bentuk integrasi antara kegiatan pertanian, edukasi dan wisata yang berbasis kawasan. Salah satu lokasi yang dipilih yaitu Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Balai Penyuluhan Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Konsep AEW di lokasi ini adalah untuk mendukung kegiatan urban farming. Salah satu komponen dalam AEW di Provinsi DKI Jakarta ini adalah pembuatan rumah pengemasan/packing house yang berfungsi untuk penanganan pasca panen dan mengemas produk pertanian yang dihasilkan sehingga produk tersebut tetap aman dan higienis.

Sesuai dengan kontrak pengadaan dengan penyedia, beberapa item yang diadakan untuk packing house ini antara lain adalah: pembuatan bangunan fisik berupa ruangan partisi, pekerjaan instalasi listrik, peralatan pendukung operasional packing house seperti meja stainless, keranjang untuk bahan baku dan produk setelah dikemas, rak stainless untuk penirisan, plastik kemasan, mesin wrapping, AC ruangan, thermometer, kipas blower, timbangan elektrik, pallet plastic, dll. Dengan adanya packing house ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada produk hortikultura yang ditanam di lahan AEW seperti

kangkung, bayam, tomat, cabe, dll, sehingga nantinya produk tersebut lebih aman dan higienis serta nilai jualnya lebih baik.

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.866.500 atau 99,22% dari anggaran belanja sebesar Rp100.000.000.

#### 4. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN

Kegiatan ini di tujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Berikut Pagu dan Realisasi anggaran dan realisasi fisik per output kegiatan

KETERANGAN	REALISASI	BANPEM BARANG		
		PAGU	REALISASI	%
1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan		1.010.330.000	1.002.448.400	99,22
1817.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1.010.330.000	1.002.448.400	99,22
526311 Banper Barang - Agro Edu Wisata (AEW)	5 Lokasi	1.000.000.000	992.448.400	99,24
526311 Banper Barang - Peralatan Kantor untuk mendukung kegiatan	1 Propinsi	10.330.000	10.000.000	96,81

- **AGRO EDU WISATA (AEW)**

Kegiatan Pengembangan Agro Edu Wisata merupakan kegiatan pengembangan kawasan pembangunan pertanian yang tidak saja digunakan sebagai kawasan produksi pertanian, kawasan konservasi sekaligus sebagai kawasan plasma nutfah, tetapi juga dapat menjadi suatu kawasan yang mampu menunjukkan keragaan teknologi berbasis inovasi, tempat belajar, magang, bahkan inkubasi bisnis, yang juga sekaligus sebagai Kawasan wisata.

Pada Tahun 2020 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengimplementasikan kegiatan Agro Edu Wisata sebagai bentuk integrasi antara kegiatan pertanian, edukasi dan wisata yang berbasis kegiatan strategis seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Gerakan Pekarangan Pangan (GPP), Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) dan pengembangan *Urban Farming*.

Pemilihan lokasi didasarkan pada: (1) kinerja kegiatan kelompok; (2) potensi wilayah; (3) integrasi dengan tempat wisata lainnya yang sudah eksis sebelumnya; serta (4) kesiapan dan dukungan komitmen Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.

Kegiatan Agro Edu Wisata difungsikan sebagai tempat pelatihan, pemagangan, kemitraan usaha, pusat diseminasi dan advokasi bisnis ke masyarakat luas serta sekaligus menjadi kawasan wisata yang aman, ramah pengunjung dan ramah lingkungan bagi wisatawan domestik maupun manca negara.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Agro Edu Wisata bulan Oktober 2020 oleh Badan Ketahanan Pangan dan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 59/KPTS/KN.220/J/09/2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Agroedu Wisata Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020.

Kegiatan ini bertujuan menjadikan kegiatan strategis Badan Ketahanan Pangan sebagai destinasi Agro Edu Wisata. Sasarannya adalah terbentuknya kawasan Agro Edu Wisata di 5 lokasi yaitu di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan DKI Jakarta sebagai destinasi wisata dan sarana belajar berbasis pertanian.

Penerima bantuan atas kegiatan ini adalah :

1. Kelompok P2L Kelompok Tani Batu Badaguak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
2. Kelompok P2L KWT Binama, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat.
3. Kelompok P2L KWT Karya Tani, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah.
4. Kelompok PKU Gapoktan Tri Manunggal, Kab. Kulon Progo, DIY.
5. BPP Ragunan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sesuai dengan kontrak pengadaan, beberapa item barang/jasa yang diadakan antara lain : Pembuatan Saung Pelatihan, mulsa tanaman, pembuatan tangga masuk, pagar, bedengan, pembuatan jalan setapak, pembuatan kandang, pembuatan hidroponik, Rehab rumah produksi susu, freezer, tv , alat pemerah susu kambing, dan banner.

Terdapat Realisasi Belanja 526311 berupa barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.000.000 atau 96,81% dari anggaran belanja sebesar Rp10.330.000 pada satker 049037 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berupa 2 unit desktop, yang di pergunakan untuk mendukung kegiatan di perencanaan, pelaporan dan evaluasi.

Badan Ketahanan Pangan membuat aplikasi untuk memonitoring kegiatan prioritas atas belanja mak 526 diatas. yang dapat di akses melalui alamat : <http://emonevbanper.bkp.pertanian.go.id/> sehingga dapat diketahui perkembangan atas bantuan yang diberikan per kelompok penerima. Monitoring Kegiatan ini juga dapat di

akses melalui alamat : <http://bastbanpem.pertanian.go.id/2020>. Monitoring pada aplikasi bastbanpem.pertanian, untuk banpem berupa barang telah di input dan direviu oleh tim Itjen sebesar Rp5.342.440.628 (100%) dan banpem berupa uang telah direviu tim Itjen sebesar Rp225.875.000.000(99,10%). Rekap bantuan dalam bentuk barang disajikan pada Lampiran F.2.9.

## B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.254.311.470 dan Rp18.293.918.156. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.163.898.897,00 atau 1,63% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh menurunnya pagu anggaran.

**Tabel B.5.1 Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi Netto	Naik (Turun)
	31 Desember 2020		31 Desember 2020	31 Desember 2019	
	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.430.023.500		3.430.023.500	15.057.391.598	(11.627.368.098)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.817.000		91.817.000	2.903.442.158	(2.811.625.158)
Belanja Modal Lainnya	1.737.720.970	5.250.000	1.732.470.970	333.084.400	1.399.386.570
<b>Jumlah</b>	<b>5.259.561.470</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.254.311.470</b>	<b>18.293.918.156</b>	<b>(13.039.606.686)</b>

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

### B.5.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.430.023.500 dan Rp15.057.391.598. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp11.627.368.098 atau 77,22% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini secara signifikan

dipengaruhi oleh penurunnya pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang signifikan pada satker Badan Ketahanan Pangan Pusat.

**Tabel B.5.1 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.430.023.500	15.057.391.598	(77,22)
Jumlah Belanja Kotor	<b>3.430.023.500</b>	<b>15.057.391.598</b>	<b>(77,22)</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.430.023.500</b>	<b>15.057.391.598</b>	<b>(77,22)</b>

### B.5.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp91.817.000 dan Rp2.903.442.158. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.811.625.158 atau 96,84% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh penurunnya pagu anggaran belanja modal gedung dan kantor untuk mendukung kegiatan.

**Tabel B.5.2.1 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.817.000	2.903.442.158	(96,84)
Jumlah Belanja Kotor	<b>91.817.000</b>	<b>2.903.442.158</b>	<b>(96,84)</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>91.817.000</b>	<b>2.903.442.158</b>	<b>(96,84)</b>

### B.5.3 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.732.470.970 dan Rp333.084.400. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami

penurunan sebesar Rp1.399.386.570 atau 420,13% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019.

**Tabel B.5.3.1 Perbandingan Belanja Modal Lainnya  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	1.737.720.970	333.084.400	421,71
Jumlah Belanja Kotor	<b>1.737.720.970</b>	<b>333.084.400</b>	<b>421,71</b>
Pengembalian	(5.250.000)	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.732.470.970</b>	<b>333.084.400</b>	<b>420,13</b>

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA****ASET LANCAR****C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp334.300.000 dan Rp30.373.682 dengan rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

**Tabel C.1 Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019**

Keterangan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran UP	334.300.000	0	334.300.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	30.373.682	(30.373.682)	(100,00)
Uang Tunai	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>334.300.000</b>	<b>30.373.682</b>	<b>303.926.318</b>	<b>1.000,62</b>

Sado Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada satker 299444DK Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Monitoring daftar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	KODE DAN NAMA SATKER	POSISI PER 31 DESEMBER 2020(Rp)	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)		
			TANGGAL SETOR	NOMOR NTPN	JUMLAH PENYETORAN (Rp)
1	299444 DK DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	334.300.000	08/01/2021	266AB0N9V861UKMI	80.000.000
			08/01/2021	ED08E6U8E26OPK83	30.000.000
			11/01/2021	4FCAB7QLTSP87GNE	25.000.000



			12/01/2021	81EAB0N9V8660Q3M	17.500.000
			17/01/2021	C6BE048VUIFSP5IK	40.000.000
			17/01/2021	4B9E648VUIFTNQ7I	40.000.000
			18/01/2021	135A41JNF2OOGQ75	60.000.000
			19/01/2021	CAFDD3CIENTICELF	19.800.000
			19/01/2021	A61A055DED2A4QGB	22.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>334.300.000</b>			<b>334.300.000</b>

Daftar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan daftar rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 disajikan pada **Lampiran C.1.1** dan **C.1.2**.

## C.2 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp291.598.872. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut.

**Tabel C.2.1 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019**

Keterangan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	981.696.022	291.598.872	690.097.150	236,66
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0,00
Kas Lainnya di BLU	0	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>981.696.022</b>	<b>291.598.872</b>	<b>690.097.150</b>	<b>236,66</b>

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker sebagai berikut :

**Tabel C.2.2 Rincian Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker per 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Satker	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	0	3.702.000	(3.702.000)	(100,00)

2	059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR	15.000.000		15.000.000	0
3	089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0	7.000.000	(7.000.000)	(100,00)
4	099426 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	15.000.000		15.000.000	0
5	129224 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	33.507.875		33.507.875	0
6	149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	103.500.000	(103.500.000)	(100,00)
7	179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	10.000.000	20.000.000	(10.000.000)	(50,00)
8	189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	53.828.700	(53.828.700)	(100,00)
9	199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	565.622	(565.622)	(100,00)
10	249020 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	192.132.500	0	192.132.500	0
11	259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA	30.000.000	4.047.550	25.952.450	641,19
12	299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	0	52.455.000	(52.455.000)	(100,00)
13	319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	0	46.500.000	(46.500.000)	(100,00)
14	339029 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	100.000	0	100.000	0
15	452332 BADAN KETAHANAN PANGAN PUSAT	685.955.647	0	685.955.647	0
	<b>Jumlah</b>	<b>981.696.022</b>	<b>291.598.872</b>	<b>690.097.150</b>	<b>236,66</b>

Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 disajikan pada **Lampiran C.3.1**

### **C.3 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp70.416.000 dan Rp6.695.000.000. Belanja Dibayar Dimuka merupakan

hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Tabel C.3 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Satker**

KODE	NAMA SATKER	31/12/2020	31/12/2019	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
018.11.059444	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	0	1.885.000.000	(1.885.000.000)	(100,00)
018.11.079318	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0	265.000.000	(265.000.000)	(100,00)
018.11.099426	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU	0	180.000.000	(180.000.000)	(100,00)
018.11.109019	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	0	50.000.000	(50.000.000)	(100,00)
018.11.119225	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0	2.220.000.000	(2.220.000.000)	(100,00)
018.11.219169	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	0	50.000.000	(50.000.000)	(100,00)
018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	27.012.000		27.012.000	#DIV/0!
018.11.259022	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA	13.500.000	1.285.000.000	(1.271.500.000)	(98,95)
018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	29.904.000		29.904.000	#DIV/0!
018.11.339029	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	0	760.000.000	(760.000.000)	(100,00)
	<b>TOTAL</b>	<b>70.416.000</b>	<b>6.695.000.000</b>	<b>(6.624.584.000)</b>	<b>(98,95)</b>

Untuk Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.695.000.000 telah dikeluarkan dari neraca karena kekurangan dokumen pertanggungjawaban atas saldo tersebut telah tindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Itjen Kementan No. R.103/PW.130/G4/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 (terlampir).

#### C.4 PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp19.025.000. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut :

**Tabel C.4 Perbandingan Piutang PNBPN per 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Piutang	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang PNBPN	19.025.000	0	19.025.000	0
2	Piutang Lainnya	0	187.672.486	0	187.672.486
	<b>Jumlah</b>	<b>19.025.000</b>	<b>187.672.486</b>	<b>19.025.000</b>	<b>187.672.486</b>

Piutang bukan pajak ini merupakan denda keterlambatan atas pekerjaan pemerintah pada kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan SKTJM nomor : 521/225/DKP-SOLID/XII/2018 tanggal 30 Juni 2019.

Mutasi transaksi pengurangan Piutang Bukan Pajak dikarenakan adanya penyetoran ke kas negara dari satker Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Barat dengan NTPN : 1134855DE4PCLCDF tanggal 29/12/2020 sebesar Rp19.025.000.

Mutasi transaksi penambahan Piutang Lainnya dikarenakan adanya Pengembalian LS atas perjalanan dinas dan honor TA. 2020 sebesar Rp187.672.486 yang belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan akhir periode pelaporan oleh pelaksana kegiatan sesuai dengan surat keterangan tertanggal 15 Februari 2021.

#### C.5 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp92.444.035. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Satker per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Tabel C.5. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Satker**

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
----	----------	-----------------------	-----------------	------------------	-----------------------

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	74.517.671	0	74.517.671	0
2	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	17.926.364	0	17.926.364	0
	<b>Jumlah</b>	<b>92.444.035</b>	<b>0</b>	<b>92.444.035</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel C.5 diatas, rincian atas mutasi transaksi pengurangan Piutang TP/TGR dikarenakan adanya penyetoran ke kas negara dari satker :

Seram Bagian Barat :

NTPN : 2BF1348VU9KI28V2 sebesar Rp1.500.000 tanggal 12 Juni 2020

NTPN : 101031JNEQ36GP9H sebesar Rp15.000.000 tanggal 7 Agustus 2020

NTPN : B846F7QLTK45GOJU sebesar Rp3.000.000 tanggal 14 Agustus 2020

NTPN : A354C55DE4IRA4R1 sebesar tanggal 09/10/2020 Rp55.017.671

Seram Bagian Timur

NTPN : 70DBC6U8DHP43QB sebesar Rp17.926.364 tanggal 13 Agustus 2020

**C.6 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG LANCAR**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(9.244.403,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Lancar sebagai berikut.

**Tabel C.6. Rincian Penyisihan Piutang Lancar**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	0	0,05	0
Kurang Lancar	0	0,10	0
Diragukan	0	0,50	0
Macet	0	1,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar		0,05	0
Kurang Lancar	0	0,10	0
Diragukan		0,50	0

Macet		1,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Piutang Lainnya</b>			
Lancar	70.416.000	0,05	938.362
Kurang Lancar	0	0,10	0
Diragukan	0	0,50	0
Macet	0	1,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>70.416.000</b>		<b>938.362</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>70.416.000</b>		<b>938.362</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

No	Eselon I	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>Piutang Bukan Pajak</b>					
1	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	0	1.902.500	(1.902.500)	(100)
<b>Jumlah</b>			<b>1.902.500</b>	<b>(1.902.500)</b>	<b>(100)</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>					
1	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	0	7.451.767	(7.451.767)	(100)
2	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	0	1.792.636	(1.792.636)	(100)
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>9.244.403</b>	<b>(9.244.403)</b>	<b>(100)</b>
<b>Piutang Lainnya</b>					
1	BADAN KETAHANAN PANGAN PUSAT	70.416.000	0	70.416.000	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		<b>70.416.000</b>	<b>0</b>	<b>70.416.000</b>	<b>(100)</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		<b>70.416.000</b>	<b>11.146.903</b>	<b>59.269.097</b>	<b>531,71</b>

### C.7 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah senilai Rp1.050.000 dan Rp6.443.685.400.

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan perbandingan rincian Jenis Persediaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel C.7 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019**

Persediaan	31/12/2020	31/12/2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Barang Konsumsi	1.050.000		1.050.000	#DIV/0!
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	6.086.305.000	(6.086.305.000)	(100,00)
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	357.380.400	(357.380.400)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.050.000</b>	<b>6.443.685.400</b>	<b>(6.119.043.300)</b>	<b>(94,96)</b>

Saldo Awal persediaan sebesar Rp6.443.685.000 telah dikeluarkan dari neraca, karena kekurangan dokumen pertanggungjawaban atas saldo tersebut telah tindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Itjen Kementan No. R.103/PW.130/G4/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 (terlampir).

Rincian Persediaan per satker sebagai berikut :

KODE	NAMA SATKER	JUMLAH	
		31-Dec-20	31-Dec-19
<b>Akun 117111 : Persediaan Barang Konsumsi :</b>			
018.11.299444	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	1.050.000	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>
<b>Akun 117124 : Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat:</b>			
018.11.119225	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN		2.221.880.000
018.11.229164	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI		358.625.000
018.11.239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		1.214.850.000
018.11.299444	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN		2.290.950.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>6.086.305.000</b>
<b>AKUN : 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat</b>			
018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	0	79.000.000
018.11.299444	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	0	278.380.400
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>357.380.400</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.050.000</b>	<b>6.443.685.400</b>

## ASET TETAP

Nilai Aset Tetap Kementerian Pertanian per 31 Desember 2020 dan 2019 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah masing-masing senilai Rp21.811.755.782 dan Rp22.767.170.526. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

**Tabel C.8 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Aset Tetap	31/12/2020	31/12/2019	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	53.031.386.144	52.253.829.266	777.556.878	1,49
3	Gedung dan Bangunan	430.324.000	864.181.000	(433.857.000)	(50,22)
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	4.329.476.128	2.903.442.158	1.426.033.970	49,12
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	(36.029.853.355)	(33.254.281.898)	(2.780.277.592)	8,36
<b>Jumlah</b>		<b>21.761.332.917</b>	<b>22.767.170.526</b>	<b>(1.005.837.609)</b>	<b>(4,42)</b>

### C. 8 TANAH

Tanah yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0.

### C.9 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing senilai Rp53.031.368.144 dan Rp52.253829.266. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

**Tabel C.9.1 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020**

Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Peralatan dan Mesin	52.253829.266	3.765.181.500	(2.987.624.622)	53.031.368.144

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

**Tabel C.9.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020**



URAIAN	NILAI (Rp)
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	3.486.123.500
Koreksi Saldo Awal	275.000.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	4.058.000
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>3.765.181.500</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transaksi Normalisasi BMN	(602.000)
Penghapusan	(88.250.000)
Hibah (Keluar)	(1.667.593.055)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(1.231.179.567)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(2.987.624.622)</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan peralatan dan mesin dari transaksi pembelian di Satker Pusat Badan Ketahanan Pangan Rp3.486.123.500.
- b. Penambahan peralatan dan mesin dari transaksi koreksi saldo awal atas kendaraan (mobil) yang telah diusulkan penghapusan di gunakan kembali pada Satker Badan Ketahanan Pangan Pusat sebesar Rp275.000.000.
- c. Penambahan peralatan dan mesin dari transaksi Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi di Satker Dinas Ketahanan Pangan provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp4.058.000
- d. Pengurangan dari transaksi Hibah keluar sebesar Rp(1.497.293.055) pada satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp(170.300.000) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru selatan sebesar Rp(559.870.715), Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp(665.422.340) dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp272.000.000.
- e. Pengurangan dari transaksi penghapusan sebesar Rp(88.250.000) pada satker Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru sebesar Rp(67.250.000) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp(21.000.000).
- f. Pengurangan dari transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp(602.000), pada Satker Dinas Ketahanan Pangan provinsi Nusa Tenggara Barat.
- g. Pengurangan dari transaksi Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp(1.231.179.567) pada satker Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp( 34.900.000 ) dan Badan Ketahanan Pangan Pusat sebesar Rp(1.196.279.567).

Adapun nilai saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut.

**Tabel C.9.3 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 Setelah Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	NILAI (Rp)
<b>Saldo Perolehan Per 31 Desember 2019</b>	<b>52.253.829.266</b>
Mutasi Tambah	3.765.181.500
Mutasi Kurang	(2.987.624.622)
<b>Saldo Perolehan Per 31 Desember 2020</b>	<b>53.031.386.144</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	(35.972.819.577)
<b>Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2020</b>	<b>17.058.566.567</b>

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 :

**Tabel C.9.4. Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020**

<b>Belanja Aset Peralatan dan Mesin :</b>	
<b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.430.023.500</b>
<b>Mutasi :</b>	
Pembelian	3.486.123.500
Pengembangan langsung	-
<b>Total Mutasi Aset</b>	<b>3.486.123.500</b>
<b>Selisih</b>	<b>(56.100.000)</b>
<b>Penjelasan Selisih :</b>	
Pembelian Ekstrakomptabel	-
BM Peralatan Mesin untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain PM	-
Perolehan/Pengembangan PM dari BM selain BM Peralatan & Mesin	-
Perolehan/Pengembangan PM dari Belanja Modal Lainnya	56.100.000
Koreksi karena Pengembalian Belanja Modal	-

Belanja Modal Peralatan dan mesin menurut LRA sebesar Rp3.430.023.500, menurut data di simak-bmn sebesar Rp3.486.123.500, sehingga terdapat selisih sebesar Rp56.100.000. Selisih ini terjadi karena adanya realisasi belanja modal lainnya yang digunakan untuk membeli peralatan dan mesin sebesar Rp56.100.000

Rincian Peralatan dan Mesin per satker sebagai berikut :

No	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	018.11.019032	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	62.059.800
2	018.11.029346	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	268.100.000

3	018.11.039427	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	886.527.500
4	018.11.049037	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	314.442.000
5	018.11.059444	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	482.688.000
6	018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	299.448.000
7	018.11.079318	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	255.340.000
8	018.11.089266	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	337.503.000
9	018.11.099426	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	335.968.000
10	018.11.109019	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	548.351.750
11	018.11.119225	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	279.015.250
12	018.11.129224	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	293.710.000
13	018.11.139021	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	408.000.000
14	018.11.149214	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	505.822.583
15	018.11.159192	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	96.281.960
16	018.11.169000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	265.100.000
17	018.11.179212	DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	251.474.000
18	018.11.189206	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	385.370.000
19	018.11.191305	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN DAERAH KAB. JENEPONTO	38.936.960
20	018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	912.220.500
21	018.11.209186	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	363.577.000
22	018.11.219169	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	756.887.800
23	018.11.239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.129.874.090
24	018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	71.678.000
25	018.11.259022	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	340.667.000
26	018.11.269189	DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	258.950.000
27	018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	771.408.064
28	018.11.289191	DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA	180.000.000
29	018.11.299444	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	445.280.000
30	018.11.309208	DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	274.750.000

31	018.11.319005	DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	199.142.954
32	018.11.320097	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN	349.840.000
33	018.11.339029	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	430.500.000
34	018.11.340161	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	219.649.100
35	018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	40.012.822.833
<b>TOTAL</b>			<b>53.031.386.144</b>

### C.10 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp430.324.000 dan Rp864.181.000. Mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

**Tabel C.10.1. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020**

Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Gedung dan Bangunan	864.181.000	356.023.707	(789.880.707)	430.324.000

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel C.10.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020**

URAIAN	NILAI (Rp)
<b>Mutasi Tambah</b>	
Koreksi Kesalahan input IP	65.609.000
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	69.211.707
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	162.123.000
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	59.080.000
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>356.023.707</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Hibah (Keluar)	(347.963.000)
Koreksi Kesalahan input IP	(89.845.000)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(227.282.707)
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	(124.790.000)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(789.880.707)</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan dari transaksi Koreksi Kesalahan input IP sebesar Rp 65.609.000 pada satker Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Tengah
- b. Penambahan dari transaksi Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali sebesar Rp69.211.707 pada satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY sebesar Rp10.290.000 dan satker Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 58.921.707
- c. Penambahan dari transaksi Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi sebesar Rp162.123.000 pada satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY
- d. Penambahan dari transaksi Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi sebesar Rp59.080.000 pada satker Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp3.951.000 dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara TP sebesar Rp55.129.000.
- e. Pengurangan dari transaksi Hibah keluar sebesar Rp(347.963.000) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY keluar sebesar Rp(265.023.000) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp(82.940.000)
- f. Pengurangan dari transaksi Kesalahan Input IP sebesar Rp(89.845.000) pada satker Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp(30.765.000), Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp(3.951.000) dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara TP sebesar Rp(55.129.000).
- g. Pengurangan dari transaksi Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan sebesar Rp(227.282.707) pada satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY sebesar Rp(172.413.000) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp(54.869.707).
- h. Pengurangan dari transaksi Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi sebesar Rp(124.790.000) pada satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara DK sebesar Rp(55.129.000), satker Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp(65.609.000) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp(4.052.000) .

Adapun nilai saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut :

**Tabel C.10.3 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 Setelah Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2019	864.181.000
Mutasi Tambah	356.023.707

Mutasi Kurang	(789.880.707)
<b>Saldo Perolehan Per 31 Desember 2020</b>	<b>430.324.000</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	(57.033.778)
<b>Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2020</b>	<b>373.290.222</b>

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020.

**Tabel C.10.4. Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020**

URAIAN	NILAI (Rp)
<b>Pencatatan Gedung dan Bangunan SAIBA</b>	<b>430.324.000</b>
<b>Pencatatan Gedung dan Bangunan SIMAK</b>	<b>430.324.000</b>
<b>Selisih</b>	<b>-</b>
<b>Pencatatan SIMAK dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU	
<b>Total Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>0</b>
Hibah (Masuk)	
Pembelian	91.817.000
Pengembangan KDP	
Pengembangan Nilai Aset	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	
Perolehan/Penambahan KDP	
<b>Total Pencatatan Gedung dan Bangunan</b>	<b>91.817.000</b>
<b>Selisih</b>	<b>(91.817.000)</b>

Belanja Gedung dan Bangunan menurut LRA sebesar Rp91.817.000, menurut data di simak-bmn sebesar Rp 0, sehingga terdapat selisih sebesar Rp91.817.000. Selisih ini terjadi karena belanja tersebut digunakan untuk renovasi gedung dan bangunan sehingga pengiriman dari Simak BMN berupa Aset Tetap Renovasi

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan Per Satker per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	018.11.189206	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	159.819.000
2	018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	101.841.000
3	018.11.289191	DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA	168.664.000
<b>TOTAL</b>			<b>430.324.000</b>

### C.11 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing masing senilai Rp0 dan Rp0

### C.12 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masingmasing senilai Rp4.329.476.128 dan Rp2.903.442.158. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

**Tabel C.12.1 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020**

Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	2.903.442.158	1.426.033.970	0	4.329.476.128

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap lainnya adalah sebagai berikut.

**Tabel C.12.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020**

URAIAN	NILAI (Rp)
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	1.426.033.970
Transfer Masuk	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>1.426.033.970</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan	0
Transfer Keluar	0
Hibah (Keluar)	0
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>

Mutasi transaksi Penambahan aset tetap lainnya merupakan transaksi pembelian dari belanja Modal Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan Pusat sebesar Rp 1.334.216.970 dan belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp91.817.000.

Adapun nilai saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut :

**Tabel C.12.3 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 Setelah Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	NILAI (Rp)
--------	------------

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2019</b>	<b>2.903.442.158</b>
Mutasi Tambah	1.426.033.970
Mutasi Kurang	0
<b>Saldo Perolehan Per 31 Desember 2020</b>	<b>4.329.476.128</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	0
<b>Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2020</b>	<b>4.329.476.128</b>

Berikut ini disajikan rincian pencatatan Aset Tetap Lainnya terhadap belanja modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel C.12.4. Rincian Pencatatan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020**

URAIAN	NILAI (Rp)
<b>Pencatatan Aset Tetap Renovasi SAIBA</b>	<b>4.329.476.128</b>
<b>Pencatatan Aset Tetap Renovasi SIMAK</b>	<b>4.329.476.128</b>
Selisih	-
<b>Pencatatan SIMAK dari Belanja Modal Lainnya</b>	
Belanja Modal Lainnya	1.334.216.970
<b>Total Belanja Modal Lainnya</b>	<b>1.334.216.970</b>
Hibah (Masuk)	
Pembelian	<b>1.426.033.970</b>
Pengembangan Nilai Aset	
<b>Total Pencatatan Aset Tetap Renovasi</b>	<b>1.426.033.970</b>
<b>Selisih</b>	<b>(91.817.000)</b>

Selisih ini terjadi karena adanya belanja modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk renovasi gedung dan bangunan sehingga pengiriman dari Simak BMN berupa Aset Tetap Renovasi sebesar Rp91.817.000.

Aset Tetap Lainnya terdapat pada Badan Ketahanan Pangan Pusat sebesar Rp4.329.476.128.

### C.13 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing masing senilai Rp36.036.482.302,00 dan Rp33.254.281.898,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

**Tabel C.13.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		(Rp)	(Rp)	(Rp)



1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	53.031.386.144	35.972.819.577	17.058.566.567
3	Gedung dan Bangunan	430.324.000	57.033.778	373.290.222
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	4.329.476.128	0	4.329.476.128
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>57.846.315.272</b>	<b>36.029.853.355</b>	<b>21.761.332.917</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

NO	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
<b>AKUMULASI PERALATAN DAN MESIN :</b>			
1	018.11.019032	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	(62.059.800)
2	018.11.029346	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	(268.100.000)
3	018.11.039427	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	(886.527.500)
4	018.11.049037	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	(314.442.000)
5	018.11.059444	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	(482.688.000)
6	018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	(299.448.000)
7	018.11.079318	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	(255.340.000)
8	018.11.089266	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(337.503.000)
9	018.11.099426	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	(335.968.000)
10	018.11.109019	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	(548.351.750)
11	018.11.119225	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	(279.015.250)
12	018.11.129224	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	(293.710.000)
13	018.11.139021	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(408.000.000)
14	018.11.149214	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(505.822.583)
15	018.11.159192	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(96.281.960)
16	018.11.169000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	(265.100.000)
17	018.11.179212	DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	(251.474.000)
18	018.11.189206	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	(385.370.000)
19	018.11.191305	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN DAERAH KAB. JENEPONTO	(38.936.960)
20	018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(912.220.500)
21	018.11.209186	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(363.577.000)

22	018.11.219169	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	(756.137.800)
23	018.11.239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(1.129.874.090)
24	018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(71.678.000)
25	018.11.259022	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	(340.667.000)
26	018.11.269189	DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	(258.950.000)
27	018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	(710.994.258)
28	018.11.289191	DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA	(173.571.429)
29	018.11.299444	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	(443.780.000)
30	018.11.309208	DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	(274.750.000)
31	018.11.319005	DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	(199.142.954)
32	018.11.320097	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN	(349.840.000)
33	018.11.339029	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	(394.050.000)
34	018.11.340161	DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	(219.649.100)
35	018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	(23.059.798.643)
		<b>JUMLAH AKUMULASI PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>(35.972.819.577)</b>
<b>AKUMULASI GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
1	018.11.189206	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	(9.988.688)
2	018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	(8.693.741)
3	018.11.289191	DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA	(38.351.349)
		<b>JUMLAH AKUMULASI GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>(61.739.913)</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>(36.034.559.490)</b>

## ASET LAINNYA

### C.14 ASET TAK BERWUJUD

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp627.359.000,00 dan Rp285.205.000,00. Aset Tak Berwujud terdiri dari Hak Cipta, Paten, Software, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel C.14.1 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset**

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Hak Cipta	0	0	0	0

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
2	Paten	0	0	0	0
3	Software	627.359.000	285.205.000	342.154.000	12,33
4	Lisensi	0	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>627.359.000</b>	<b>285.205.000</b>	<b>342.154.000</b>	<b>3,11</b>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 113/Permentan/PL.140/9/2014 Tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian dinyatakan bahwa:

1. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Aset ini merupakan hasil kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan.
2. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hak Paten dan Hak Cipta tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
5. *Software* Komputer adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi (penghubung) atau pengguna (*user*) dan perangkat keras (*hardware*) yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *hard disk*, *external disk*, *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software* Komputer yang masuk dalam kategori ATB yaitu *software* yang

bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain.

6. Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.
7. Hasil Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Rincian mutasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut.

**Tabel 14.2 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2020**

Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	285.205.000	347.404.000	5.250.000	627.359.000

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tidak berwujud adalah sebagai berikut.

**Tabel C.14.3 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020**

Uraian	Jumlah
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	285.205.000
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>347.404.000</b>
Pembelian	248.954.000
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Pengembangan Nilai Aset	98.450.000
Koreksi Pencatatan	0
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>5.250.000</b>
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Penghapusan	0
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Pencatatan	5.250.000
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>627.359.000</b>
<b>Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2020</b>	<b>(223.401.000)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>403.958.000</b>

Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud dari belanja modal pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel C.14.4 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal Lainnya**

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencatatan Aset Tak Berwujud SAIBA	627.359.000
Pencatatan Aset Tak Berwujud SIMAK	627.359.000
<b>Selisih</b>	-
<b>Pencatatan SIMAK dari Belanja Modal Lainnya</b>	
<b>Belanja modal lainnya</b>	<b>398.254.000</b>
Mutasi :	
Pembelian	248.954.000
Pengembangan langsung	98.450.000
Koreksi Aset Tak Berwujud Lainnya	(5.250.000)
<b>Total Mutasi Aset</b>	<b>342.154.000</b>
<b>Selisih</b>	<b>56.100.000</b>

Selisih ini terjadi karena adanya realisasi belanja modal lainnya yang digunakan untuk membeli peralatan dan mesin sebesar Rp56.100.000. Aset Tak Berwujud berupa software ini terdapat pada satker Badan Ketahanan Pangan Pusat.

### C.15 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp2.244.188.567,00 dan Rp1.132.290.000,00. Aset Lain -lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Ketahanan Pangan serta dalam proses penghapusan dari BMN

Rincian mutasi Aset Lain-Lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Tabel C.15.1 Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020**

Aset Lainnya	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Lain-lain	1.132.290.000	1.231.179.567	(119.281.000)	2.244.188.567

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset lain-lain adalah sebagai berikut.

**Tabel C.15.2 Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020**

URAIAN	NILAI (Rp)
<b>Mutasi Tambah</b>	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.231.179.567
Reklasifikasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>1.231.179.567</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	(3.456.000)

Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(115.825.000)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(119.281.000)</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain adalah sebagai berikut :

- a. Mutasi tambah berasal dari transaksi reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp 1.231.179.567 pada satker Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 34.900.000 dan Badan Ketahanan Pangan Pusat sebesar Rp1.196.279.567.
- b. Mutasi kurang berasal dari transaksi Normalisasi BMN yang dihentikan sebesar Rp(3.456.000) pada satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Mutasi kurang berasal dari transaksi Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp(115.825.000) pada satker Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp4.000.000 dan Dinas Pangan Aceh sebesar Rp111.825.000.

Adapun nilai saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut :

**Tabel C.15.3 Rincian Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020  
Setelah Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	NILAI (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>1.132.290.000</b>
Mutasi Tambah	1.231.179.567
Mutasi Kurang	(119.281.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>2.244.188.567</b>
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2020	(2.244.188.567)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>

Rincian aset lain-lain per satker adalah sebagai berikut :

No	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
<b>AKUN : 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan</b>			
1	018.11.029346	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	71.494.000
2	018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	273.479.000
3	018.11.219169	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	195.664.000
4	018.11.239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	447.322.000
5	018.11.269189	DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	19.950.000
6	018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	1.196.279.567
<b>Jumlah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan</b>			<b>2.204.188.567</b>
<b>AKUN : 166113 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan</b>			
1	018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	40.000.000

Jumlah ATB yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	40.000.000
<b>TOTAL ASET LAIN-LAIN</b>	<b>2.244.188.567</b>

### C.16 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp2.467.589.567,00 dan Rp1.128.834.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel C.16 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020**

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
<b>A</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>			
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	627.359.000	223.401.000	403.958.000
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>627.359.000</b>	<b>223.401.000</b>	<b>403.958.000</b>
<b>B</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.204.188.567	2.204.188.567	0
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	40.000.000	40.000.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2.244.188.567</b>	<b>2.244.188.567</b>	<b>0</b>
	<b>Total</b>	<b>2.871.547.567</b>	<b>2.467.589.567</b>	<b>403.958.000</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi aset lainnya per satker adalah sebagai berikut :

No	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
<b>AKUN : 169315 Akumulasi Amortisasi Software</b>			
1	018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	(223.401.000)
	<b>Jumlah</b>		<b>(223.401.000)</b>
<b>AKUN : 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan</b>			
1	018.11.029346	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	(71.494.000)
2	018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	(273.479.000)

3	018.11.219169	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	(195.664.000)
4	018.11.239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(447.322.000)
5	018.11.269189	DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU	(19.950.000)
6	018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	(1.196.279.567)
<b>Jumlah</b>			<b>(2.204.188.567)</b>
AKUN : 169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan			
1	018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	(40.000.000)
<b>Jumlah</b>			<b>(40.000.000)</b>
<b>TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>			<b>(2.467.589.567)</b>

## KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp367.525.222. dan Rp59.800.735.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada di bawah ini.

**Tabel C.17 Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	33.225.222	29.427.053	3.798.169	19,50
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0
Uang Muka Dari KPPN	334.300.000	30.373.682	303.926.318	(23,50)
<b>Jumlah</b>	<b>367.525.222</b>	<b>59.800.735</b>	<b>307.724.487</b>	<b>19,10</b>

## C.17 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp33.225.222,00 dan Rp29.427.053,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

**Tabel 17.1 Perbandingan Rincian Utang Pihak Ketiga**

NO	Eselon I	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Badan Ketahanan Pangan Pusat	33.225.222	29.427.053	3.798.169	12,91



NO	Eselon I	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>Jumlah</b>	<b>33.225.222</b>	<b>29.427.053</b>	<b>3.798.169</b>	<b>12,91</b>

Pada Badan Ketahanan Pangan, utang kepada pihak ketiga merupakan belanja barang yang masih harus dibayar. Belanja barang yang masih harus dibayar ini merupakan pemakaian listrik di bulan Desember 2020 sebesar Rp30.495.594 dan telepon di bulan Desember 2020 sebesar Rp2.729.628.

**Tabel C.17.2 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0	0	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	33.225.222	29.427.053	3.798.169	12,91
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0	0	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>33.225.222</b>	<b>29.427.053</b>	<b>3.798.169</b>	<b>12,91</b>

### C.18 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima Dimuka antara lain merupakan pendapatan sewa ruangan untuk mesin ATM, kantin, dan sewa tanah.

### C.19 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp334.300.000 dan Rp30.373.682. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

## EKUITAS

### C.20 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp23.371.961.841 dan Rp36.557.010.877. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Apabila dibandingkan perbedaan nilai atas Pendapatan LRA dan LO sebagai berikut:

**Tabel D. Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2020**

URAIAN	LRA	LO	SELISIH
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	35.829.969	16.804.969	19.025.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	232.987.231	232.987.231	0
Pendapatan Non Operasional Lainnya	4.688.047.275	4.425.879.065	262.168.210
<b>TOTAL</b>	<b>4.956.864.475</b>	<b>4.675.671.265</b>	<b>281.193.210</b>

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.804.969 dan Rp55.038.561, terdiri atas :

KETERANGAN	31/12/2020	31/12/2019	% Naik (TURUN)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	16.096.664	29.427.839	(45,30)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	708.305	25.610.722	(97,23)
<b>Total</b>	<b>16.804.969</b>	<b>55.038.561</b>	<b>(69,47)</b>

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yaitu sebagai berikut :

KETERANGAN		JUMLAH
<b>425764   Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</b>		<b>(708.305)</b>
018.11.029346	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	(551.594)
018.11.039427	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	(138.071)
018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	(18.640)
<b>425811   Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah</b>		<b>(16.096.664)</b>
018.11.229164	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	(1.000)
018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(10.684.300)
018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	(5.411.364)
<b>TOTAL</b>		<b>(16.804.969)</b>

**Tabel D.1.1 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2020 (dalam Rupiah)**

AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	708.305	708.305	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.121.664	16.096.664	19.025.000
<b>TOTAL</b>		<b>35.829.969</b>	<b>16.804.969</b>	<b>19.025.000</b>

Realisasi pendapatan negara bukan pajak menurut LRA sebesar Rp35.829.969 sedangkan menurut LO sebesar Rp16.804.969, sehingga terdapat selisih sebesar Rp19.025.000, hal ini disebabkan karena adanya pelunasan piutang PNBPN yang telah dicatat pada tahun anggaran yang lalu.

## D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.849.990.366 dan Rp20.022.804.490. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.889.420.216 dan Rp20.022.804.490. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel D.2.1 Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)**

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2020	31/12/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	14.097.758.220	14.623.789.626	(24,13)
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0		
Beban Pembulatan Gaji PNS	192.627	227.278	(34,77)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	-	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	969.931.420	1.019.098.372	(25,09)
Beban Tunj. Anak PNS	270.618.796	277.141.709	(23,03)
Beban Tunj. Struktural PNS	664.870.000	677.600.000	(24,15)
Beban Tunj. Fungsional PNS	917.082.000	846.942.000	(16,43)
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0

Beban Tunj. PPh PNS	74.757.255	82.722.445	(27,33)
Beban Tunj. Beras PNS	635.992.440	662.136.060	(27,50)
Beban Uang Makan PNS	1.864.261.150	1.429.237.000	(7,42)
Beban Tunjangan Umum PNS	365.900.000	403.910.000	(27,95)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>19.849.990.366</b>	<b>20.022.804.490</b>	<b>(22,85)</b>

Jika dibandingkan dengan TA 2019, pada TA 2020 terdapat penurunan atas beban pegawai. Hal ini dipengaruhi oleh pegawai yang meninggal dunia, mutasi dan pensiun.

Realisasi Belanja Pegawai menurut LRA sebesar Rp 19.889.420.216 sedangkan menurut LO sebesar Rp19.849.990.366, sehingga terdapat selisih sebesar Rp39.429.850, hal ini disebabkan karena adanya kelebihan pembayaran belanja uang makan PNS yang disetorkan lewat tahun Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Pusat, dengan NTPN : 1BF320N9V86JDTI8 tanggal 27 Januari 2021.

### D.3 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.645.205.014 dan Rp12.657.868.645. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel D.3.1 Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2020	31/12/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan bahan baku	1.508.250	64.128.250	(97,65)
Beban Persediaan konsumsi	7.635.107.764	12.566.197.395	(38,93)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges		3.438.000	(100,00)
Beban persediaan lainnya	8.589.000	24.105.000	(64,37)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>7.645.205.014</b>	<b>12.657.868.645</b>	<b>(39,29)</b>

Realisasi Belanja Persediaan menurut LRA sebesar Rp7.818.208.213 sedangkan menurut LO sebesar Rp7.645.205.014, sehingga terdapat selisih lebih besar LRA sebesar Rp173.003.199 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Beban Pemeliharaan dari realisasi belanja barang persediaan	(199.918.520)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(93.909.376)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	121.874.697
Saldo Awal Persediaan	0
Saldo Akhir Persediaan	(1.050.000)
<b>Jumlah</b>	<b>(173.003.199)</b>

- Beban Pemeliharaan dari realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp(199.918.520), dengan perincian sebagai berikut :

Kode	Nama Satker	Jumlah
018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	8.800.000
018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	90.000
018.11.320097	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	50.000
018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	190.978.520
	<b>Total</b>	<b>199.918.520</b>

- Beban Penyesuaian Persediaan sebesar Rp93.909.376, dengan perincian sebagai berikut :

KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	4.451.500
018.11.079318	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	6.471.000
018.11.099426	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	831.250
018.11.109019	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	1.300
018.11.129224	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	120.000
018.11.149214	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	6.361.000
018.11.159192	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4.214.200
018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.601.500
018.11.209186	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2.925.500
018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	42.000
018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	229.000
018.11.309208	DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.679.376
018.11.319005	DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	182.000
018.11.320097	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN	68.000
018.11.340161	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	30.000

018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	62.701.750
	<b>TOTAL</b>	<b>93.909.376</b>

- Pendapatan Penyesuaian Persediaan sebesar Rp121.874.697, dengan perincian sebagai berikut :

KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
018.11.019032	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	(30.000)
018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	(3.225.200)
018.11.099426	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	(345.050)
018.11.109019	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	(342.700)
018.11.149214	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(5.552.500)
018.11.159192	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(6.608.400)
018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(2.518.000)
018.11.209186	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(4.726.000)
018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(10.000)
018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	(40.000)
018.11.309208	DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	(8.102.807)
018.11.319005	DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	(911.500)
018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	(89.462.540)
	<b>TOTAL</b>	<b>(121.874.697)</b>

- Saldo akhir persediaan sebesar Rp1.050.000 terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp124.108.544.020 dan Rp133.084.755.948. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel D.4 Perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2020	31/12/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.789.817.225	2.298.973.028	21,35
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	46.000.000	45.634.378	0,80
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	57.773.500	131.323.180	(56,01)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	6.948.087.500	6.993.396.000	(0,65)
Pengembalian Beban Honor Oprasional Satuan Kerja	(950.000)		
Beban Barang Operasional Lainnya	162.500.000	1.177.439.960	(86,20)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.851.510.430		
Pengembalian BebanBarang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	(250.000)		
Beban Bahan	17.424.591.447	21.896.924.260	(20,42)
Pengembalian Beban Bahan	(12.000.000)	(4.297.200)	179,25
Beban Honor Output Kegiatan	37.590.508.000	56.418.724.600	(33,37)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(16.124.000)	(58.664.100)	(72,51)
BebanBarang Non Operasional Lainnya	44.091.407.880	30.588.085.660	44,15
Pengembalian belanja Barang Non Operasional Lainnya	(1.112.812.733)		
BebanBarang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	1.815.386.500		
Beban Langganan Listrik	332.492.518	281.708.351	18,03
Beban Langganan Telepon	46.677.919	62.059.106	(24,78)
Beban Langganan Air		1.036.100	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	44.000.000	371.114.000	(88,14)
Beban Sewa	3.340.707.998	3.625.899.525	(7,87)
Beban Jasa Profesi	5.643.319.000	8.393.606.000	(32,77)
Beban Jasa Lainnya	2.113.650.836	702.758.100	200,77
Pengembalian Beban Jasa Profesi		(200.000)	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin		159.235.000	(100,00)
BebanJasa - Penanganan Pandemi COVID-19	952.250.000		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>124.108.544.020</b>	<b>133.084.755.948</b>	<b>(6,74)</b>

Realisasi Belanja barang dan jasa menurut LRA sebesar Rp122.177.535.515 sedangkan menurut LO sebesar Rp124.108.544.020, sehingga terdapat selisih lebih kecil LRA sebesar Rp1.931.008.505, dengan rincian sebagai berikut :



KODE	KETERANGAN	JUMLAH
522191	Beban Jasa Lainnya - Hibah langsung	2.113.650.836
	Jurnal Balik karena Beban Langganan Telepon dan Listrik 2019 yang dibayarkan di tahun 2020	(29.427.053)
522111	Beban Langganan Listrik yang masih harus di bayar (pemakaian listrik Desember 2020)	30.495.594
522112	Beban Langganan Telepon yang masih harus di bayar (pemakaian telepon Desember 2020)	2.729.628
521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 di tahun 2021 (Pengembalian pembayaran paket data dan komunikasi)	(800.000)
521211	Pengembalian Beban Bahan di tahun 2021 (Pengembalian pembayaran paket konsumsi rapat)	(17.060.500)
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan di tahun 2021	(1.710.000)
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi di tahun 2021 (Pengembalian honor, honor narasumber dan moderator)	(166.870.000)
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.931.008.505</b>

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.405.651.669 dan Rp4.701.246.850. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel D.5 Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-2020	31-Dec-19	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.467.082.810	1.863.781.825	(21,28)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.738.650.339	2.704.540.125	1,26
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	191.118.520	132.924.900	43,78
Beban Persediaan suku cadang	8.800.000		
<b>Jumlah</b>	<b>4.405.651.669</b>	<b>4.701.246.850</b>	<b>(6,29)</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan menurut LRA sebesar Rp4.205.733.149 sedangkan menurut LO sebesar Rp4.405.651.669, sehingga terdapat selisih lebih kecil LRA sebesar Rp199.918.520 dikarenakan adanya belanja barang konsumsi yang digunakan untuk belanja persediaan bahan untuk pemeliharaan, pada satker sebagai berikut:

Kode	Nama Satker	Jumlah
593114	Beban Persediaan suku cadang :	

018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	8.800.000
<b>593113</b>	<b>Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan :</b>	
018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	90.000
018.11.320097	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	50.000
018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	190.978.520
	<b>Total</b>	<b>199.918.520</b>

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp74.170.789.539 dan Rp129.917.244.271. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-20	31-Dec-19	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	42.707.430.350	67.447.639.483	(36,68)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(17.991.342)	(55.275.190)	(67,45)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.931.356.700	9.995.256.752	(0,64)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(75.000)	-	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.380.085.200	15.679.917.091	(52,93)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(780.000)	(12.200.000)	(93,61)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.049.040.000	-	#DIV/0!
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	(18.150.000)		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.862.216.500	34.943.318.880	(63,19)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(25.425.000)	(37.115.000)	(31,50)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(3.834.072)		#DIV/0!
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	170.673.717	1.955.702.255	
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri		-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>74.034.547.053</b>	<b>129.917.244.271</b>	<b>(43,01)</b>

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas menurut LRA sebesar Rp74.682.304.836 sedangkan menurut LO sebesar Rp74.034.547.053, sehingga terdapat selisih lebih besar LRA

sebesar Rp647.757.783, hal ini disebabkan karena adanya pengembalian belanja perjalanan dinas yang disetorkan ditahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	KETERANGAN	JUMLAH
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa di tahun 2021	457.273.983
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota di tahun 2021	1.045.000
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota di tahun 2021	189.438.800
	<b>JUMLAH</b>	<b>647.757.783</b>

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp245.676.825.837 dan Rp328.521.027.919. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel D.7 Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-2020	31-Dec-2019	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada			#DIV/0!
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	550.000	620.367.000	
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		477.050.800	
Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat		122.439.492	
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada			
Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau			
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9.022.255.150	38.091.829.597	(76,31)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	141.906.100	(100,00)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.105.207.250	3.087.560.030	(64,20)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.658.113.588	22.350.275.757	(92,58)
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	#DIV/0!
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	234.283.826.825	264.828.261.803	(11,53)
Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	(393.126.976)		
Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	-	(1.198.662.660)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>245.676.825.837</b>	<b>328.521.027.919</b>	<b>(25,22)</b>

Realisasi Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat menurut LRA sebesar Rp232.904.296.812 sedangkan menurut LO sebesar Rp245.676.825.837, sehingga terdapat selisih lebih kecil LRA sebesar Rp12.772.529.025, hal ini disebabkan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Persediaan 526	6.443.685.400
Saldo Awal belanja di bayar dimuka atas belanja 526	6.695.000.000
Saldo Akhir Persediaan 526	0
Pengembalian Belanja Mak 526312 di tahun 2021	(366.156.375)
<b>Jumlah</b>	<b>12.772.529.025</b>

- Kekurangan dokumen pertanggungjawaban atas saldo awal sebesar Rp13.138.685.400 telah tindaklanjuti sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Itjen Kementan No. R.103/PW.130/G4/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 (terlampir).
- Pengembalian Belanja Mak 526312 di tahun 2021 telah disetorkan ke kas Negara, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Satker	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	059444 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur	2-Feb-21	925EC3CIEO 01LLFN	5.000.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL : KWT Bintang Sembilan Kab. Jombang TA. 2020
2	059444 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur	2-Feb-21	437FD61QU7 N6SJRJ	10.000.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL : KWT Dewi Sekar Putih Kab. Jombang TA. 2020
3	099426 Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	13-Jan-21	6CADC6U8E2 6ST8LJ	15.000.000	Sisa dana PIPL dari Kelompok UKM Kulim Jaya
4	129224 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	26-Jan-21	BDEC155DE D2HEDKN	33.507.875	Sisa dana PIPL Kelompok KUB Rizki Cassava
5	179212 Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	7-Jan-21	5B22A6U8E2 6NMQGP	10.000.000	Sisa Dana P2L : KWT Sejahtera, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
6	289039 Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	23-Mar-21	42AC07QLTS VHT7KO	29.904.000	Pengembalian Sisa Banper LPM TA. 2020 : LPM Batu Putih, Halmahera Selatan

7	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	18-Jan-21	B8BC155DED 2778HF	97.760.000	Sisa dana PKU Tahun 2020 dari dari Kelompok Tani Simpatik Rp25.800.000, Kelompok Tani Harapan Baru Rp25.800.000, Kelompok Tani Daya Karya Rp25.800.000, Kelompok Tani Daya Karya Rp25.800.000, Kelompok Tani Kelompok Tani Nekmese Rp20.360.000
8	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	691958N3DN EC38RH	13.000.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Kembang Sari Kab. TTU TA. 2020
9	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	70D3F55DED 4QFAJB	3.000.000	Pengembalian BanperP2L/ KRPL KWT Nekamnaut Kab. TTU TA. 2020
10	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	A66DD7QLTS RVMBKS	33.140.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Mnelalete Kab. TTS TA. 2020
11	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	C4FBA7QLTS RVMD84	7.900.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Sejahtera Kab. TTS TA. 2020
12	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	17A2C2G4UT DL8EJM	8.412.500	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Oemathonis Kab. TTS TA. 2020
13	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	DD6603CIEO 01LFCN	7.900.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Bersehati Kab. TTS TA. 2020
14	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	5-Feb-21	BC3EF0N9V8 8UJSG8	21.020.000	Pengembalian Banper PIPL Gapoktan Muda Muda Mandiri Kab. Kupang TA. 2020
15	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2-Mar-21	434818N3DN HAHNA5	4.112.000	Pengembalian Sisa Banper P2L T.A.2020, KWT. Fetomone, Kupang

16	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2-Mar-21	4CAB255DED 7OUBAB	15.000.000	Pengembalian Sisa Banper P2L T.A.2020, KWT.Mandiri I , Nagekeo
17	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2-Mar-21	546BE8N3DN HAIDHD	7.900.000	Pengembalian Sisa Banper P2L T.A.2020, KWT.Bife Meto, TTS
18	259022 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	26-Jan-21	2B9F02G4UT BC6AH6	15.000.000	Sisa dana P2L/KRPL : KWT Sildoki, Kabupaten Pegunungan Bintang
19	259022 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	26-Jan-21	E8DB78N3DN C31C2F	15.000.000	Sisa DanaP2L/KRPL KWT PKT, Kabupaten Pegunungan Bintang
20	259022 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	23-Feb-21	9ED9D0N9V8 9AU8JM	6.750.000	Pengembalian Sisa Banper P2L TA. 2020 : Kelompok Tani Harapan Kampung Jaifuri, Kecamatan Skanto Kab.Keerom
21	259022 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	26-Feb-21	0D8CD0N9V8 9I6UGE	6.750.000	Pengembalian Sisa Banper P2L TA. 2020 : Kelompok Tani Tani Cenderawasih Jaya, Kampung Gudang Garam Kecamatan Skanto Kab.Keerom
22	339029 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	15-Jan-21	5CB331JNF2 OKIE47	100.000	Sisa Dana PP2L/KRPL : KWT Sirih, Kabupaten Teluk Bintuni .
	<b>Total</b>			<b>366.156.375</b>	

#### D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.604.193.471 dan Rp4.852.396.421. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-20	31-Dec-19	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.436.434.305	4.824.928.187	12,67
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.919.416	19.892.104	(45,11)
Beban Penyusutan Iaset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	-	2.576.130	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	5.000.000	(100,00)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>5.447.353.721</b>	<b>4.852.396.421</b>	<b>12,26</b>
Beban Amortisasi Software	156.839.750	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>156.839.750</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>5.604.193.471</b>	<b>4.852.396.421</b>	<b>15,49</b>

#### D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(10.208.541) dan Rp10.579.190

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-20	31-Dec-19	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagihan - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(9.244.403)	8.871.815	(204,20)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	938.362	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang PNPB	(1.902.500)	1.707.375	(211,43)
<b>Jumlah</b>	<b>(10.208.541)</b>	<b>10.579.190</b>	<b>(103,63)</b>

Nilai beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih minus dikarenakan adanya angsuran/pelunasan piutang tak tertagih senilai Rp111.469.035.

#### D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsientitas.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.420.226.241 dan Rp801.987.475.

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	(232.987.231)	7.934.489	(3.036,39)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	144.730.679	(2.260.282.862)	(106,40)
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4.425.879.065)	3.635.480.038	(221,74)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	93.909.376	(581.144.190)	(116,16)
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(4.420.226.241)</b>	<b>801.987.475</b>	<b>(651,16)</b>

- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**

Pendapatan sejumlah Rp232.987.231 terdiri atas akun dan satker sebagai berikut :

KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
<b>425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan</b>		
018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	(1.697.900)
018.11.139021	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(3.000.000)
018.11.159192	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(725.000)
018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	(227.084.331)
<b>425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan</b>		
018.11.119225	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	(480.000)
		<b>(232.987.231)</b>

- Beban Pelepasan Aset Non Lancar**

Beban pelepasan aset non lancar senilai Rp144.730.679 yang terdapat pada satker sebagai berikut :

Kode	Nama Satker	Jumlah
018.11.049037	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	86.436.000.
018.11.219216	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	28.459.654.



018.11.219223	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU SELATAN	29.835.025.
	<b>TOTAL</b>	<b>144.730.679.</b>

• **Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp4.425.879.065 terdiri atas akun sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH
425793   Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak	(47.304.010)
425911   Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(77.615.005)
425912   Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(4.179.085.353)
491511   Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	(121.874.697)
<b>TOTAL</b>	<b>(4.425.879.065)</b>

- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga terdapat pada satker Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp47.304.010.
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu terdapat pada satker Badan Ketahanan Pangan Pusat sebesar Rp77.615.005.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp4.179.085.353, terdapat pada satker sebagai berikut :

KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
018.11.029346	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	(115.683.864)
018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	(65.260.671)
018.11.099426	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	(44.777.273)
018.11.119225	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	(5.909.091)
018.11.129224	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	(37.018.091)
018.11.179212	DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	(5.454.546)
018.11.189206	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	(1.573.638)
018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(103.993.919)
018.11.239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(75.909.092)
018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(40.000.000)
018.11.259022	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	(24.000.000)
018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	(37.000.000)

018.11.299444	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	(199.908.636)
018.11.340161	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	(9.085.909)
018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	(3.413.510.623)
	<b>TOTAL</b>	<b>(4.179.085.353)</b>

- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp121.874.697 terdapat pada satker sebagai berikut :

KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
018.11.019032	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	(30.000)
018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	(3.225.200)
018.11.099426	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	(345.050)
018.11.109019	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	(342.700)
018.11.149214	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(5.552.500)
018.11.159192	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(6.608.400)
018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(2.518.000)
018.11.209186	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(4.726.000)
018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(10.000)
018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	(40.000)
018.11.309208	DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	(8.102.807)
018.11.319005	DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	(911.500)
018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	(89.462.540)
	<b>TOTAL</b>	<b>(121.874.697)</b>

Realisasi pendapatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut LRA sebesar Rp4.688.047.275 sedangkan menurut LO sebesar Rp4.425.879.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp262.168.210, hal ini disebabkan sebagai berikut :

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	121.874.697
425912 Penyetoran PNPB atas kegiatan Banper TAYL	(291.598.872)
Saldo Awal TP/TGR	(92.444.035)
Saldo Akhir TP/TGR	0
<b>JUMLAH</b>	<b>(262.168.210)</b>

- **Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Beban ini merupakan beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp93.909.376 yang terdapat pada satker sebagai berikut :

KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	4.451.500
018.11.079318	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	6.471.000
018.11.099426	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	831.250
018.11.109019	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	1.300
018.11.129224	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	120.000
018.11.149214	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	6.361.000
018.11.159192	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4.214.200
018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.601.500
018.11.209186	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2.925.500
018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	42.000
018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	229.000
018.11.309208	DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.679.376
018.11.319005	DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	182.000
018.11.320097	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN	68.000
018.11.340161	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	30.000
018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	62.701.750
	<b>TOTAL</b>	<b>93.909.376</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp36.557.010.877 dan Rp12.102.110.040.

### E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(476.877.717.679) dan Rp(632.910.897.698). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

**Tabel E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam Rupiah)**

Uraian Koreksi Nilai Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Persediaan Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E.3.2 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(66.561.250) dan Rp0. Koreksi atas Akumulasi Amortisasi Software terpadat pada Badan Ketahanan Pangan Pusat.

**Tabel E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam Rupiah)**

Uraian Koreksi Atas Reklasifikasi	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
Akumulasi Amortisasi Software	(66.561.250)	0	0
	(66.561.250)	0	0

**E.3.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP**

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(251.518.707) dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan hasil inventarisasi dan penilaian kembali oleh KPKNL atas aset-aset pada Kementerian Pertanian.

Tabel E.3.3 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	(251.518.707)	0	0
	(251.518.707)	0	0

Selisih Revaluasi Aset Tetap terdapat pada :

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY sebesar Rp(172.413.000) disebabkan karena Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan
- Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan karena Kesalahan Input IP sebesar Rp(30.765.000)
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Tengah disebabkan karena Koreksi Kesalahan input IP sebesar Rp65.609.000
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sula disebabkan karena Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan sebesar sebesar Rp(54.869.707)
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara TP disebabkan karena Kesalahan input IP sebesar Rp(55.129.000).
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan disebabkan karena Kesalahan Input IP sebesar Rp(3.951.000)

**E.3.4 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI**

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(78.520.277) dan Rp(600.000). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam Rupiah)

Uraian Koreksi Nilai Aset Non Reval	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap	(78.520.277)	(600.000)	119,20

Aset Tetap Lainnya	(3.456.000)	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>(78.520.277)</b>	<b>(600.000)</b>	<b>124,96</b>

Berikut Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada :

Akun 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi :

NO	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	049037	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	9.578.500
2	189206	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.153.688
3	239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(602.000)
4	289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	(52.439.780)
5	289048	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan	(77.144.392)
6	289052	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA	54.869.707
7	289109	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	55.129.000
8	289184	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	(65.609.000)
		<b>JUMLAH</b>	<b>(75.064.277)</b>

Akun 391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi :

NO	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	239.220	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	(3.456.000)
		<b>Jumlah</b>	<b>(3.456.000)</b>

### E.3.5 KOREKSI LAIN-LAIN

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

### E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp464.089.268.877 dan Rp657.366.398.535. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel E.4 Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	466.931.810.211	659.662.417.614

313121	Diterima dari Entitas Lain	(4.956.864.475)	(2.998.777.179)
313221	Transfer Masuk	672.305	0
391131	Pengesahan Hibah Langsung	2.113.650.836	702.758.100
<b>JUMLAH</b>		<b>464.089.268.877</b>	<b>657.366.398.535</b>

#### E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN / DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp(4.956.864.475) dan Rp(2.998.777.179) sedangkan DKEL sebesar Rp466.931.810.211 dan Rp659.662.417.614.

- Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp(4.956.864.475), dengan perincian sebagai berikut :

No	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	018.11.029346	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	116.235.458
2	018.11.039427	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	3.840.071
3	018.11.069027	DINAS PANGAN ACEH	66.977.211
4	018.11.089266	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	7.000.000
5	018.11.099426	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	44.777.273
6	018.11.119225	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	53.693.101
7	018.11.129224	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	37.018.091
8	018.11.139021	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3.000.000
9	018.11.149214	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	103.500.000
10	018.11.159192	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	725.000
11	018.11.179212	DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	25.454.546
12	018.11.189206	DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	55.402.338
13	018.11.199374	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	104.559.541
14	018.11.219211	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	93.542.671
15	018.11.219216	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	17.926.364
16	018.11.229164	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	1.000
17	018.11.239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	75.909.092
18	018.11.249020	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	50.684.300

19	018.11.259022	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	28.047.550
20	018.11.289039	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	37.000.000
21	018.11.299444	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	252.363.636
22	018.11.319005	DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO	46.500.000
23	018.11.340161	DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	9.085.909
24	018.11.452332	BADAN KETAHANAN PANGAN	3.723.621.323
<b>TOTAL</b>			<b>4.956.864.475</b>

#### **E.4.2 TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp672.305 dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0.

#### **E.4.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.113.650.836.

Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp 2.113.650.836. terdapat pada Badan Ketahanan Pangan Pusat. Hibah ini di berikan oleh *World Food Programme (WFP)* Indonesia.

Hibah langsung jasa ini merupakan Hibah Proyek Mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan dan menganalisa data tentang Ketahanan Pangan dan gizi guna optimalisasi kebijakan serta program di Badan Ketahanan Pangan Pusat, Propinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Nomor Register atas Hibah : 2WTVSDDA

Nilai Hibah : USD 1.204.163 ekuivalen Rp. 16.942.573.410,- (Kurs Rp. 14.070,- per satu dollar).



Didalam Perjanjian Kerjasama, hibah ini dimulai per tanggal 28 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, tetapi dalam pelaksanaannya, sumber pendanaan tidak sesuai dengan MoU yang telah direncanakan, sehingga kegiatan baru terealisasi sesuai dengan BAST No. B.1137/KN.010/J.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Realisasi Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah USD 150.224 ekuivalen Rp. 2.113.650.836,- (Kurs Rp. 14.070,- per satu dollar). Sudah ada Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HLBJS) Nomor : B-639/KU.200/J/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor : B-640/KU.200/J/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020. Sudah diterbitkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHLBJS) dari KPPN Jakarta V dengan Nomor : 1018743334 Tanggal 31 Desember 2020.

Hibah ini rencananya akan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2021.

#### **E.5 EKUITAS AKHIR**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp23.371.961.841 dan Rp36.557.010.877.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Terdapat jurnal tidak lazim pada Badan Ketahanan Pangan Pusat karena :
  - Belanja Modal Lainnya digunakan untuk membeli Peralatan dan Mesin (Laptop) sehingga Data yang di kirim oleh simak BMN merupakan peralatan dan mesin yang belum di register sedangkan data pada saiba adalah aset lainnya yang belum di register senilai Rp56.100.000, maka dilakukan jurnal umum atas transaksi tersebut
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk merenovasi gedung dan bangunan sehingga Data yang di kirim oleh simak BMN merupakan Aset Tetap Renovasi belum di register sedangkan data pada saiba adalah Gedung dan Bangunan yang belum di register senilai Rp91.817.000, maka dilakukan jurnal umum atas transaksi tersebut
2. Terdapat sisa dana Banper TA. 2020 yang disetorkan di tahun 2021, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Satker	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	059444 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur	2-Feb-21	925EC3CIE001L LFN	5.000.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL : KWT Bintang Sembilan Kab. Jombang TA. 2020
2	059444 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur	2-Feb-21	437FD61QU7N6S JRU	10.000.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL : KWT Dewi Sekar Putih Kab. Jombang TA. 2020
3	099426 Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	13-Jan-21	6CADC6U8E26S T8LJ	15.000.000	Sisa dana PIPL dari Kelompok UKM Kulim Jaya
4	129224 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	26-Jan-21	BDEC155DED2H EDKN	33.507.875	Sisa dana PIPL Kelompok KUB Rizki Cassava
5	179212 Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	7-Jan-21	5B22A6U8E26N MQGP	10.000.000	Sisa Dana P2L : KWT Sejahtera, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara

6	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	18-Jan-21	B8BC155DED2778HF	97.760.000	Sisa dana PKU Tahun 2020 dari dari Kelompok Tani Simpatik Rp25.800.000, Kelompok Tani Harapan Baru Rp25.800.000, Kelompok Tani Daya Karya Rp25.800.000, Kelompok Tani Daya Karya Rp25.800.000, Kelompok Tani Kelompok Tani Nekmese Rp20.360.000
7	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	691958N3DNEC38RH	13.000.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Kembang Sari Kab. TTU TA. 2020
8	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	70D3F55DED4QFAJB	3.000.000	Pengembalian BanperP2L/ KRPL KWT Nekamnaut Kab. TTU TA. 2020
9	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	A66DD7QLTSRVMBKS	33.140.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Mnelalete Kab. TTS TA. 2020
10	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	C4FBA7QLTSRVMD84	7.900.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Sejahtera Kab. TTS TA. 2020
11	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	17A2C2G4UTDL8EJM	8.412.500	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Oemathonis Kab. TTS TA. 2020
12	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	DD6603CIEO01LFCN	7.900.000	Pengembalian Banper P2L/KRPL KWT Bersehati Kab. TTS TA. 2020
13	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	5-Feb-21	BC3EF0N9V88UJSG8	21.020.000	Pengembalian Banper PIPL Gapoktan Muda Muda Mandiri Kab. Kupang TA. 2020

14	259022 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	26-Jan-21	2B9F02G4UTBC6 AH6	15.000.000	Sisa dana P2L/KRPL : KWT Sildoki, Kabupaten Pegunungan Bintang
15	259022 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	26-Jan-21	E8DB78N3DNC3 1C2F	15.000.000	Sisa DanaP2L/KRPL KWT PKT, Kabupaten Pegunungan Bintang
16	339029 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	15-Jan-21	5CB331JNF2OKI E47	100.000	Sisa Dana PP2L/KRPL : KWT Sirih, Kabupaten Teluk Bintuni .
<b>Total</b>				<b>295.740.375</b>	

3. Perubahan data (Audited) atas sisa dana Banper TA. 2020 yang disetorkan di tahun 2021, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Satker	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	434818N3DNH AHNA5	4.112.000	Pengembalian Sisa Banper P2L T.A.2020, KWT. Fetomone, Kupang, NTT
2	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	4CAB255DED7 OUBAB	15.000.000	Pengembalian Sisa Banper P2L T.A.2020, KWT.Mandiri I , Nagekeo, NTT
3	249020 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3-Feb-21	546BE8N3DNH AIDHD	7.900.000	Pengembalian Sisa Banper P2L T.A.2020, KWT.Bife Meto, TTS
4	259022 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	23-02-2021	9ED9D0N9V89 AU8JM	6.750.000	Pengembalian Sisa Banper P2L TA. 2020 : Kelompok Tani Harapan Kampung Jaifuri Kecamatan Skanto Kab.Keerom
5	259022 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	26-02-2021	0D8CD0N9V89I 6UGE	6.750.000	Pengembalian Sisa Banper P2L TA. 2020 : Kelompok Tani Tani Cenderawasih Jaya Kampung Gudang Garam Kecamatan Skanto Kab.Keerom
6	289039 Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	23-03-2021	42AC07QLTSV HT7KO	29.904.000	Pengembalian Sisa Banper LPM TA. 2020 LPM Batu Putih, Halmahera Selatan
<b>Total</b>				<b>70.416.000</b>	

4. Terdapat pengembalian/sisa belanja (LS) TA. 2020 yang di setorkan di tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut :

KETERANGAN	TANGGAL SETOR	NTPN	Total
511129- Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	27-01-2021	1BF320N9V86JDTI8	39.429.850
<b>511129 Total</b>			<b>39.429.850</b>
521131 - Pengembalian pembayaran paket data dan komunikasi	04-01-2021	272511JNF2OB4FMN	200.000
		8FE311JNF2OB4GGV	600.000
<b>521131 Total</b>			<b>800.000</b>
521211 - Pengembalian pembayaran paket konsumsi rapat	13-01-2021	E68148N3DNBHRUT	16.460.500
<b>521211 Total</b>			<b>16.460.500</b>
522151 - Pengembalian honor, honor narasumber dan moderator	08/01/2021	05ED148VUIFKJTV4	3.315.000
	13/01/2021	4857755DED202S4D	6.195.000
		988296U8E26OSSV1	24.480.000
		9AD2948VUIFNL7HQ	960.000
	18/01/2021	0C9E52G4UTB4UV7S	82.800.000
<b>522151 Total</b>			<b>117.750.000</b>
524111 - Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	05/02/2021	D995861QU7N7UPRE	1.648.450
	06/01/2021	0BF130N9V860QTP4	1.250.000
		586236U8E26NMN49	304.632
		63DEF0N9V860R12O	100.600
	07/01/2021	1F6C048VUIFIEUL2	2.950.600
		409556U8E26OP9PD	967.936
		5D0417QLTSP4462O	2.945.000
		6E88E6U8E26NLUSB	650.550
		7E0BD55DED1UT55J	550.000
		8DADA55DED1USOTN	245.500
		9F92C8N3DNBGG07R	303.300
		D83761JNF2OD80HJ	2.324.000
		D91C28N3DNBGG1RN	1.584.000
		E127B7QLTSP43GC2	1.000
		E64E748VUIFIG4BU	1.210.000
	08/01/2021	00CDD7QLTSP67E18	5.346.300
		04B0F2G4UTAROI72	816.000
		0E6741JNF2OEC0RL	17.991.600
		1DDB12G4UTARP89U	110.000
		1F0B13CIENT62CAH	29.284.700
		28EA23CIENT867BL	915.000
		312EC7QLTSP571CE	77.835.874

		37E298N3DNBIK6TP	200.400
		37FCE3CIENT795UN	240.000
		37FD02G4UTAQOTNM	111.077
		382833CIENT85GDT	705.000
		3EB2D61QU7KDE8RK	1.651.800
		448F28N3DNBHK8B9	1.852.600
		4F1D68N3DNBIK2TV	52.200
		5ACF86U8E26PQNK3	100.000
		5CFA70N9V862V750	24.000
		92BCE7QLTSP56E6C	120.285.836
		9F5A52G4UTAROV76	57.100
		A86B47QLTSP43068	1.758.050
		D8A6B6U8E26PPO7N	167.528.792
		E648648VUIFJISK4	700.000
	09/01/2021	853BC61QU7KCG73M	3.380.400
		8936C7QLTSP5A60O	140.000
		912018N3DNBHN6VD	1.100.000
		9F33C61QU7KCG61A	502.000
	09/02/2021	4FEE07QLTSS5TC86	360.000
	11/01/2021	A41AB55DED232D0D	190.000
	12/01/2021	61ED96U8E26RSFHD	1.710.000
	15/01/2021	BDB0F3CIENTDB7HJ	900.000
	29/01/2021	7B09C7QLTSPPRHTG	110.000
<b>524111 Total</b>			<b>452.994.297</b>
524114 - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18/01/2021	886EE3CIENT8629F	1.045.000
<b>524114 Total</b>			<b>1.045.000</b>
524119 - Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	08/01/2021	1432F6U8E26PQN1L	52.970.000
		6023E6U8E26NM42J	426.000
		8304561QU7KDD1PU	345.000
		BB36D7QLTSP672LQ	210.000
	18/01/2021	0C9E52G4UTB4UV7S	3.525.000
<b>524119 Total</b>			<b>57.476.000</b>
<b>Grand Total</b>			<b>685.955.647</b>

5. Perubahan data (Audited) atas pengembalian/sisa belanja (LS) TA. 2020 yang di setorkan di tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut :

KETERANGAN	TANGGAL SETOR	NTPN	Total
521211 Belanja Bahan	09/03/21	58FA161QU7QBMN76	200.000

		DBCEC2G4UTGQ2NDA	400.000
521211 Belanja Bahan Total			600.000
521213 Honor Output Kegiatan	09/03/21	B61A73CIEO36FIO9	570.000
	10/03/21	5B32F8N3DNHGTIDR	1.140.000
521213 Honor Output Kegiatan Total			1.710.000
522151 Belanja Jasa Profesi	29/03/21	206063CIEO3Q5FAT	19.110.000
	05/03/21	E31A27QLTSV1ECMQ	17.510.000
	09/03/21	D8D648N3DNHGTJEV	12.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi Total			49.120.000
524111 Belanja perjalanan biasa	26/03/21	27CB155DED8G0Q6P	1.060.647
		67A961JNF2UUCQ9P	237.700
		9AE1B6U8E2D8QQ41	874.875
		AF9CE6U8E2D8QQ2F	17.449
		D2E891JNF2UUCQB1	261.999
	29/03/21	27D4161QU7QVCD7Q	549.900
		9788C6U8E2DBQ6ON	566.000
		DF11E0N9V8CKUH3C	68.400
	05/03/21	9C65E1JNF2UAJBFH	83.000
	09/03/21	346AD1JNF2UDLKHN	486.000
		5E0543CIEO36FJ1L	73.716
524111 Belanja perjalanan biasa Total			4.279.686
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17/2/2021	612F27QLTSSBVOEO	390.000
	29/03/21	1CA560N9V8CKUGGK	9.012.800
		5467255DED8IVDSN	1.585.000
	05/03/21	84D8F61QU7Q8KCB6	15.000
	09/03/21	88C340N9V8C18J8O	605.000
	10/02/21	D71942G4UTDSHUD6	117.000.000
	10/03/21	3B8C41JNF2UDLFIB	605.000
		657556U8E2CO3GM5	2.750.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Total			131.962.800
Grand Total			187.672.486

## **F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

### **F.2.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK**

Monitoring daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut atas temuan BPK dijelaskan sebagaimana dalam **Lampiran F.2.1.**

### **F.2.2. MONITORING PINJAMAN DAN HIBAH**

Di Badan Ketahanan Pangan terdapat hibah langsung jasa yaitu Hibah Proyek Mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan dan menganalisa data tentang Ketahanan Pangan dan gizi guna optimalisasi kebijakan serta program di Badan Ketahanan Pangan Pusat, Propinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pemberi Hibah nya adalah World Food Programme (WFP) Indonesia. Nomor Hibah : 2WTVSDDA, dengan Nilai Hibah USD 1.204.163 ekuivalen Rp. 16.942.573.410,- (Kurs Rp. 14.070,- per satu dollar). Hibah ini dimulai per tanggal 28 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2020.

Didalam Perjanjian Kerjasama, hibah ini dimulai per tanggal 28 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, tetapi dalam pelaksanaannya, sumber pendanaan tidak sesuai dengan MoU yang telah direncanakan, sehingga kegiatan baru terealisasi sesuai dengan BAST No. B.1137/KN.010/J.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Realisasi Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah USD 150.224 ekuivalen Rp. 2.113.650.836,- (Kurs Rp. 14.070,- per satu dollar). Sudah ada Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HLBJS) Nomor : B-639/KU.200/J/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor : B-640/KU.200/J/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020. Sudah diterbitkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHLBJS) dari KPPN Jakarta V dengan Nomor : 1018743334 Tanggal 31 Desember 2020.

Hibah ini rencananya akan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2021.

### **F.2.3. MONITORING PENYELESAIAN SATKER INAKTIF**

Badan Ketahanan Pangan mempunyai jumlah satker inaktif sebanyak 2 satker per 31 Desember 2020. Berikut ini dapat disajikan rincian akun pada satker inaktif sebagai berikut :



**Tabel F.2.3.1 Rekapitulasi Neraca Satker Inaktif TA 2020**

No	Satker	Nama Satker	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	Grand Total
1	289191	BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA	180.000.000	168.664.000	(173.571.429)	(38.351.349)	136.741.222
2	191305	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN DAERAH KAB. JENEPONTO	38.936.960	0	(38.936.960)	0	0
		<b>Total</b>	<b>218.936.960</b>	<b>168.664.000</b>	<b>(212.508.389)</b>	<b>(38.351.349)</b>	<b>136.741.222</b>

#### F.2.4.MONITORING PENYELESAIAN DPM-LUEP

Dari hasil monitoring dan evaluasi perkembangan data tunggakan DPM-LUEP hasil rekon KPKNL sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.769.205.767 yang berada di 20 propinsi. Rekapitulasi sisa tunggakan DPM-LUEP sebagai berikut :

N O	PROVINSI	REKONSILIASI	HASIL REKON KPKNL	REKENING
1	JAWA BARAT	1. KPKNL CIREBON : Rp.69.930.002 2.KPKNL PURWAKARTA : Rp.717.100.000 3.KPKNL BANDUNG : Rp.256.058.750 4.KPKNL BOGOR : Rp512.387.000 Tanggal 31 Desember 2020	1.555.475.752	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Jawa Barat, Bank BJB, A/C : 0014291237003
2	JAWA TENGAH	DJKN JATENG : NO: S-2170/WKN.09/KNL.01/2019 tgl 10 April 2019	310.221.191	Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, A/C : 1022009751
3	JAWA TIMUR	1.KPKNL SIDOARJO: NO : BAR-07/WKN.10/KNL.02/2019 tgl 2 Desember 2019 Rp.0 2.KPKNL SURABAYA: NO : BAR-05/WKN.01/KNL.01/2019 tgl 2 Desember 2019 Rp.0 3. KPKNL Jember Tanggal 02 September 2020 Rp0	0	Badan Ketahanan Pangan Jatim, BPD Jatim, A/C : 0011200737

4	NAD	1. KPKNL LHOKEUMAWE NO : BAR-03/WKN.01/KNL.02/2020 tgl 31 Desember 2020 Rp.438.473.726 2. KPKNL BANDA ACEH, NO. BARN-01/WKN.01/KNL.0106/2021 per tanggal 31 Desember 2020 Rp.1.776.673.604	2.215.147.330	Dinas Pangan Aceh, BRI, A/C : 105201000273308
5	SUMATERA UTARA	KPKNL MEDAN : NO: S-716/WKN.02/KNL.01/2019 tgl 11 April 2019	880.676.818	Tidak ada Rekening Penampungan di satker, sesuai surat tanggal 01/04/2019
6	SUMATERA BARAT	TIDAK REKONSILIASI DENGAN KPKNL KARENA SUDAH TIDAK ADA TUNGGAKAN LAGI SESUAI DENGAN SETORAN SSBP TGL 20 JANUARI 2014	0	Lunas
7	RIAU	KPKNL PEKANBARU per tgl 31 Desember 2020	183.965.727	Rekening di tutup surat BRI No. B.3396-XVII/KC/OPS/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020
8	JAMBI	Lunas, SSBP tgl 11 Juli 2019 NTPN : 0546F4B6ACIT9Q3I Rp.29.220.000 dan surat dari PUPN Cabang Jambi No. SPPNL-10/PUPNC.08.00/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	0	Lunas, SSBP tgl 11 Juli 2019 NTPN : 0546F4B6ACIT9Q3I Rp.29.220.000 dan surat dari PUPN Cabang Jambi No. SPPNL-10/PUPNC.08.00/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas
9	SUMATERA SELATAN	KPKNL PALEMBANG : S-11/WKN.04/KNL.02/2021 Tanggal 31 Desember 2020	2.531.071.722	Proyek Pengembangan Kelembagaan, Bank BRI, A/C : 005901000949308
10	LAMPUNG	KPKNL BANDAR LAMPUNG TGL 31 Desember 2020	889.387.726	KPKNL memberikan informasi kepada petugas luep yang ditunjuk dan selanjutnya disetorkan ke kas negara
11	KALIMANTAN BARAT	1. KPKNL PONTIANAK NO : BAR-20/WKN.11/KNL.01/2020 tgl 31 Desember 2020 Rp.329.268.099 2. KPKNL SINGKAWANG NO : BA-03/WKN.11/KNL.02.04/2020 tgl 31 Desember 2020 Rp. 173.663.826	502.931.925	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat, Bank Kalbar, A/C : 1001011888
12	KALIMANTAN SELATAN	KPKNL BANJARMASIN : NO 900/1516-D/DisKP tanggal 30 Desember 2020	23.618.186	KPKNL memberikan informasi dan cek kepada petugas luep yang ditunjuk
13	SULAWESI UTARA	KPKNL MANADO : NO BAR-01/WKN.16/KNL.0104/2021 tanggal 31 Desember 2020	1.972.166.870	No Rekening Sudah Tidak Aktif
14	SULAWESI TENGAH	KPKNL PALU BAR-02/WKN.16/KNL.03/2021 tanggal 31 Desember 2020 Rp.32.727.272	32.727.272	-

15	SULAWESI SELATAN	BAR No. 900/1790/12/2020/DKPN tanggal 31 Desember 2020 1.KPKNL MAKASAR : Rp.1.288.958.178,90 2. KPKNL PALOPO NO: S- /WKN.15/KNL.04/2021 Tgl. 31 Des 2020 : Rp.540.315.910 3. KPKNL PARE-PARE NO. S- 100/WKN.15/KNL.03/2021 tgl. 31 Des 2020 : Rp.1.114.414.547,08	2.943.688.636	Badan Ketahanan Pangan Daerah Prop. SULSEL, Bank Sulselbar, A/C : 1300020000228930
16	NUSA TENGGARA BARAT	KPKNL MATARAM : BAR- 01/WKN.14/KNL.03/2020 tgl 31 Desember 2020	128.107.000	KPKNL memberikan informasi kepada petugas luep yang ditunjuk dan selanjutnya disetorkan ke kas negara
17	NUSA TENGGARA TIMUR	KPKNL KUPANG, BAR tanggal 31 Desember 2020	35.319.128	Tidak ada Rekening penampungan di Satker
18	BANTEN	KPKNL SERANG : NO: BAR- 04/WKN.06/KNL.0104/2020 tgl 16 Desember 2020	1.051.659.576	BPG 020 Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Banten (299444), Bank BRI , A/C : 008401001591301
19	GORONTALO	KPKNL GORONTALO BAR No: BA- 01/WKN.16/KNL.04/2020 tgl 30 Desember 2020	280.765.457	Badan Ketahanan Pangan Propinsi Gorontalo, Bank BRI, A/C : 002701000757306
20	SULAWESI BARAT	KPKNL SULBAR NO : 520/4318/BA/XII/2020, Tgl. 31 Desember 2020	160.240.000	Tidak ada Rekening penampungan di Satker KPKNL memberikan informasi kepada petugas luep yang ditunjuk dan selanjutnya disetorkan ke kas negara
<b>TOTAL</b>			<b>15.697.170.316</b>	

Setoran PNBP sampai dengan 31 Desember 2019 dari pengembalian DPM-LUEP sebagai berikut :

No	Nama Satker	Tanggal Setor	NTPN	Total
029346	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pro pinsi Jawa Barat	08/12/2020	7794B3C1EFK0B0EA	906.591
		8/10/2020	0B94448VU9QCP2FM	3.500
			2400861QTUV5ISLC	18.181.818
			3D7E561QTUV5IQIV	65.496.500
			8642B3CIEF80BV6S	31.092.555
		8/27/2020	CAA5861QTUVQ09TK	2.900
069027	Dinas Pangan Aceh	19/10/2020	3B86448VUA003AT0	903.290

		20/11/2020	CADCC48VUA3ODDFU	451.645
		23/12/2020	35CE27QLTKGBT50A	13.633.009
		2/17/2020	A0C977QLTJICJCUQ	1.818.182
		3/18/2020	F96116U8DP316LRN	909.091
		4/22/2020	7B0B361QTUJN20VI	36.818.182
		5/22/2020	714B42G4UKD2J12K	454.545
		6/22/2020	19A1B61QTUPM20DS	454.545
		8/27/2020	E3C963CIEF8JJ9HF	1.818.182
099426	Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Riau	15/9/2020	1BFB30N9UVK3HQCO	22.727.273
		7/23/2020	9E8AD6U8DPF2SGR7	22.050.000
119225	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Sumatera Selatan	2/25/2020	4207255DE3REL0KH	5.909.091
129224	Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Lampung	30/09/2020	CB1F71JNEQ6UG01D	909.091
		2/4/2020	436CC0N9UUUTPVTE	909.091
		3/30/2020	D15A448VU9C740VK	909.090
		8/31/2020	21E211JNEQ4043RT	909.091
		23/12/2020	FF0DE2G4UL22CHLM	16.363.637
		27/10/2020	C3EDD1JNEQ9Q4MS5	909.091
179212	Dinas Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Utara	2/24/2020	1271C55DE3REKCVF	3.636.364
		2/26/2020	EB9E048VU994B2HS	909.091
		17/11/2020	E3C5048VUA3LAFLC	909.091
189206	Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah	15/01/2020	4164B6U8DOSV0US7	23.638

199374	Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Selatan	4/2/2020	C44953CIEEPNOLGR	51.014.273
		6/12/2020	20D0A7QLTJU3LAGD	13.957.100
		7/16/2020	6284F1JNEQ0G7VRH	8.624.764
		01/10/2020	EAEF80N9UVKI5GCV	3.628.863
		06/11/2020	D5B4F3IEFGSFVAT	20.278.918
		07/12/2020	E29A13CIEFJR56KN	1.497.492
		23/12/2020	965661JNEQFISNET	4.992.509
239220	Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Barat	26/11/2020	5E1442G4UKV5O6FU	69.909.092
299444	Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Banten	6/9/2020	17D3E1JNEPT6QGVV	1.363.636
340161	Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Barat	22/10/2020	73A5B0N9UVN9KCL6	9.085.909
	<b>TOTAL</b>			<b>434.370.730</b>

Daftar nomor rekening DPM-LUEP sebagai berikut :

No	Propinsi	Ada Rekening LUEP/Tidak	No Rekening	Nama Bank	Nama Rekening
1	Jawa Barat	Ada	0014291237003	Bank BJB	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Jawa Barat
2	Jawa Tengah	Ada	1022009751	Bank Jateng	Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah
3	Jawa Timur	Ada	0011200737	BPD Jatim	Badan Ketahanan Pangan Jatim
4	NAD	Ada	105201000273308	BRI	Dinas Pangan Aceh
5	Sumatera Utara	Tidak Ada	-	-	-
6	Sumatera Barat	Tidak Ada	-	-	-
7	Riau	Ada	017001001210302	Bank BRI	Rekening di tutup surat BRI No. B.3396-XVII/KC/OPS/10/2020 tertanggal 13 Oktober 2020
8	Jambi	Tidak Ada	-	-	-
9	Sumatera Selatan	Ada	005901000949308	Bank BRI	Proyek Pengembangan Kelembagaan
10	Lampung	Tidak Ada	-	-	-

11	Kalimantan Barat	Ada	1001011888	Bank Kalbar	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat
12	Kalimantan Selatan	Tidak Ada	-	-	-
13	Sulawesi Utara	Tidak Ada	-	-	-
14	Sulawesi Tengah	Tidak Ada	-	-	-
15	Sulawesi Selatan	Ada	'1300020000327369	Bank Sulselbar	Dinas Ketahanan Pangan, TPH Prov. Sulsel
16	NTB	Tidak Ada	-	-	-
17	NTT	Tidak Ada	-	-	-
18	Banten	Ada	008401001591301	Bank BRI	BPG 020 Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Banten (299444)
19	Gorontalo	Ada	002701000757306	Bank BRI	Badan Ketahanan Pangan Propinsi Gorontalo
20	Sulawesi Barat	Tidak Ada	-	-	-